

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

1. Latar Belakang

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam

rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman teknis ini ialah menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan daripada pedoman teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Pengertian barang milik daerah.

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

b. Landasan pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:

- 1) Barang milik Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

Dasar hukum pengelolaan barang milik daerah, antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4587);

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 - 20) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
 - 21) Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Peraturan/Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Peraturan/Penetapan Status Rumah Negeri;
 - 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;
4. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah

Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi:

- a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b) pengadaan;
- c) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d) penggunaan;
- e) penatausahaan;
- f) pemanfaatan;
- g) pengamanan dan pemeliharaan;
- h) penilaian;
- i) penghapusan;
- j) pemindahtanganan;
- k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l) pembiayaan;
- m) tuntutan ganti rugi.

5. Sistematika Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, maka dalam penyusunannya digunakan sistematika sebagai berikut:

a. Umum

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan dan siklus pengelolaan barang milik daerah.

b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Dalam bab ini menetapkan tugas dan fungsi Bupati sebagai pemegang kekuasaan, Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, dan Kepala SKPD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang.

c. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

Dalam bab ini mengatur mengenai rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang, standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standarisasi harga.

d. Pengadaan

Dalam bab ini hanya akan mengatur mengenai pengadaan tanah, sedangkan pengadaan barang/jasa selain tanah akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri .

e. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Dalam bab ini mengatur mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, tugas dan tanggung jawab penyimpan barang serta administrasi penyimpanan barang.

f. Penggunaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai status penggunaan barang milik daerah baik untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi.

g. Pemanfaatan

Dalam Bab ini mengatur mengenai pemanfaatan barang daerah melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

h. Penatausahaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ruang dan Kartu Inventaris Barang serta sistem pelaporan.

i. Pengamanan Dan Pemeliharaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum serta tertib administrasi pemeliharaan barang.

j. Penilaian

Dalam Bab ini mengatur mengenai penilaian barang milik daerah baik dilakukan oleh Tim maupun oleh lembaga independent berSertipikat dibidang penilaian aset.

k. Penghapusan

Dalam Bab ini mengatur mengenai penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna barang serta dari daftar barang milik daerah.

l. Pemindahtanganan

Dalam Bab ini mengatur mengenai pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan meliputi : penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.

m. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dalam Bab ini mengatur mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

n. Pembiayaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai biaya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan tunjangan/insentif untuk penyimpan/pengurus barang.

o. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam Bab ini diuraikan mengenai penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

II. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

1. Umum

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

2. Tugas Dan Fungsi Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan, pengamanan barang milik daerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- g. menyetujui dan menetapkan penjualan barang milik daerah yang tidak melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang milik daerah.

3. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah:

- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/

- perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pembantu Pengelola yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD. Adapun tugas dan Tanggung jawab Pembantu Pengelola adalah sebagai berikut :
- a. Tanggung Jawab Pembantu Pengelola
Membantu Pengelola dalam mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada masing-masing SKPD
 - b. Tugas Pembantu Pengelola
 1. Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja dan standarisasi harga.
 2. Menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
 3. Menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang dari masing-masing SKPD.
 4. Memproses Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang pada masing-masing SKPD.
 5. Menyusun Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
 6. Menyimpan dokumen kepemilikan (Bukti Kepemilikan) Aset Daerah.
 7. Melaksanakan Sensus Barang Daerah tiap 5 (lima) tahun sekali.
 8. Melaksanakan Inventarisasi Barang Daerah.

9. Melaksanakan Verifikasi Barang Daerah secara Rutin, Berkala atau insidental.
 10. Menghimpun Laporan Barang dari masing-masing SKPD dan menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
 11. Mengatur dan melaksanakan proses Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang.
 12. Untuk membantu tugas-tugasnya, Pembantu Pengelola mengusulkan dan mengangkat Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Tingkat Daerah.
 13. Memproses Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola tentang Penunjukan Atasan Langsung, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang, Petugas Gudang dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;

- g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang; dan
 - j. Untuk membantu tugas-tugasnya, Pengguna barang mengusulkan dan mengangkat Penyimpan Barang dan Pengurus Barang.
6. Tugas Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan; dan
 - g. Untuk membantu tugas-tugasnya, Kuasa Pengguna barang mengusulkan dan mengangkat Pembantu Penyimpan Barang dan Pembantu Pengurus Barang.

7. Tugas Penyimpan Barang Tingkat Daerah adalah membantu tugas-tugas Pembantu Pengelola dalam hal :
 - a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan/menyerahkan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang bersumber dari pengadaan beban Anggaran Daerah maupun dari pihak lain yang sah ke SKPD/ Unit Pemakai;
 - b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima khususnya yang berasal dari Non Anggaran Daerah atau pihak lain yang sah;
 - c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan khususnya yang berasal dari Non Anggaran Daerah atau pihak lain yang sah;
 - d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 - e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
 - f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Pembantu Pengelola; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pembantu pengelola.
8. Tugas Pengurus Barang Tingkat Daerah adalah membantu tugas-tugas Pembantu Pengelola dalam hal:
 - a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
 - b. Menghimpun Laporan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan dari masing-masing SKPD;
 - c. Menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)

serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan dari SKPD;

- d. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan Barang Daerah kepada pengelola;
 - e. Membuat laporan setiap 6 (enam) bulan sekali yang diketahui oleh Atasan Langsung, yaitu :
 - 1. Laporan Mutasi Barang Kabupaten;
 - 2. Daftar Mutasi Barang Kabupaten;
 - 3. Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang Kabupaten;
 - 4. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Kabupaten;
 - f. Menghimpun usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi dari Pengurus Barang di SKPD;
 - g. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi se Kabupaten Pekalongan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pembantu pengelola.
9. Tugas Penyimpan Barang :
- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 - e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
 - f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

10. Tugas Pengurus Barang:

- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- c. Menghimpun dan menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan dari masing-masing Pembantu Pengurus Barang;
- d. Membuat laporan setiap 6 (enam) bulan sekali yang diketahui oleh Atasan Langsung, yaitu :
 1. Laporan Mutasi Barang;
 2. Daftar Mutasi Barang;
 3. Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang;
 4. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang;
- e. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

11. Tugas dan tanggungjawab Pembantu Penyimpan Barang adalah:

1. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
2. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
5. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan

6. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.
12. Tugas dan tanggung jawab Pembantu Pengurus Barang adalah :
- a. mencatat seluruh barang daerah yang berada dalam penguasaannya yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII);
 - b. melakukan pencatatan barang daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
 - c. menyiapkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola Barang;
 - d. Membuat laporan setiap 6 (enam) bulan sekali yang diketahui oleh Atasan Langsungnya, yaitu :
 1. Laporan Mutasi Barang;
 2. Daftar Mutasi Barang;
 3. Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang;
 4. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang;
 - e. menyiapkan usulan penghapusan barang daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi pada masing-masing SKPD.

III. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

1. Umum

Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh satuan kerja perangkat daerah terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu memahami wewenang tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bupati sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah serta mempunyai tanggung jawab untuk

melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan barang milik Daerah;

b. Bupati dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh:

1) Sekretaris Daerah selaku pengelola, sebagai koordinator dibantu oleh asisten yang membidangi melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara pembina, pengelola dan pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Apabila dalam pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah terdapat perbedaan pendapat antara unsur pembina, pengelola dan pengguna/kuasa pengguna barang yang mengakibatkan kemacetan, maka Sekretaris Daerah selaku pengelola barang berkewajiban untuk mengambil tindakan pengamanan yang bersifat sementara.

Dalam keadaan demikian, Sekretaris Daerah diminta maupun tidak diminta harus menyampaikan laporan dan saran kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan terakhir;

2) Asisten yang membidangi dibantu oleh Pembantu Pengelola bertanggungjawab atas terlaksananya tertib pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah, standarisasi harga dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan

3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna bertugas dan bertanggungjawab atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan/perbaikan, pengamanan dan pengawasan barang dalam lingkungan wewenangnya.

2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

- a. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu:
 - 1) untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
 - 2) adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
 - 3) adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
 - 4) untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan
 - 5) pertimbangan teknologi.
- b. Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan keuangan daerah;
- c. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan;
- d. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh masing-masing unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.
 - 1) Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab

masing-masing unit SKPD sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) barang apa yang dibutuhkan;
- b) dimana dibutuhkan;
- c) bilamana dibutuhkan;
- d) berapa biaya;
- e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
- f) alasan-alasan kebutuhan; dan
- g) cara pengadaan.

standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis, macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan. Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

- 2) Pembantu pengelola melaksanakan koordinasi, menyiapkan/ menyusun dan menghimpun:
 - a) rencana kebutuhan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD; dan
 - b) standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga.
- 3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) di atas, disusun oleh Panitia dan/atau Konsultan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pengelola.

f. Tahap kegiatan.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (RAPBD);
2. masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
 3. rencana kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan Bupati;
 4. setelah APBD, ditetapkan setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Bupati melalui pengelola;
 5. berdasarkan rencana tahunan barang dari semua SKPD, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk satu tahun anggaran;
 6. daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan
 7. Format Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB SKPD) (Lampiran 1) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD (RKPBMMD) (Lampiran 2).

IV. PENGADAAN

Sebagaimana termuat dalam ketentuan Bab I angka 5 huruf d, maka terkait dengan pengaturan pengadaan barang/jasa secara umum diatur dengan Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya dalam rincian Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ini hanya memuat dan mengatur Pengadaan Tanah.

1. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh pengelola.

- a. Asal-usul tanah terdiri dari:

- 1) tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai Negara);
 - 2) tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat);
dan
 - 3) tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan.
- b. Setiap penguasaan tanah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- c. Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur:
- 1) pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak;
 - 2) pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; dan
 - 3) penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya.
- d. Setelah proses pembebasan tanah atau penerimaan sumbangan/hibah selesai, perlu pengurusan lebih lanjut dalam rangka memperoleh hak atas tanahnya serta Sertipikat tanah yang bersangkutan, dengan diperolehnya Sertipikat, barulah proses pengadaan tanahnya dapat dianggap selesai, tertib dan aman terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain.

Hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sama dengan hak yang dimiliki Instansi Pemerintah, yaitu :

- 1) hak pakai, apabila tanahnya dipergunakan sendiri untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; dan
- 2) hak pengelolaan, apabila tanahnya dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak langsung berhubungan dengan

tugas, seperti pengkaplingan untuk pegawai/anggota DPRD, pola kerjasama dengan Pihak Ketiga atau penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Bupati.

e. Tata cara pembebasan tanah.

1) ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, harus dipenuhi dan ditaati dalam rangka melaksanakan pembebasan tanah oleh Pemerintah Daerah, baik untuk keperluan instansi ataupun untuk keperluan pembangunan.

2) SKPD yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan pembebasan tanah kepada Bupati dengan mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya.

Permohonan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan keterangan mengenai:

a) status tanah yang akan dibebaskan haknya (jenis/macam hak serta luas tanah);

b) gambar situasi tanah; dan

c) maksud dan tujuan pembebasan tanah dan rencana penggunaan tanah.

3) Setelah menerima permohonan, Bupati segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk diadakan penelitian terhadap data-data dan keterangan yang berhubungan dengan tanah dimaksud. Susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah terdiri atas Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional.

4) Tugas Panitia Pembebasan Tanah :

a) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada

- kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b) mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen Pendukungnya;
 - c) menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d) memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 - e) mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - f) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
 - g) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan
 - h) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan meyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- 5) Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada :

- a) pemegang Hak Atas Tanah, Bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah yang dimilikinya atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) nadzir (penerima harta wakaf) bagi tanah wakaf.
- 6) Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara.
 - 7) Dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan satu atau beberapa orang pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan, maka ganti rugi yang menjadi hak orang yang tidak dapat ditemukan tersebut dititipkan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.
- f. Tata cara perolehan hak dan penyelesaian Sertipikat hak atas tanah :
- 1) Dengan selesainya proses pembebasan tanah, berubahlah status tanahnya menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung) dan untuk dapat dikuasai sebagai Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, harus dipenuhi ketentuan permohonan hak dan penyelesaian Sertipikat hak atas tanahnya;
 - 2) Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Setelah Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut diterima oleh pemerintah daerah, selesailah proses pengadaan tanahnya;

Pengurusan lebih lanjut, sepanjang mengenai inventarisasinya terutama didasarkan kepada penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah tersebut antara lain:

- 4) Berita Acara pembebasan tanah;
 - a) berkas (pertinggal) permohonan hak pakai/hak pengelolaan;
 - b) salinan surat keputusan pemberian hak pakai/hak pengelolaan;
 - c) Sertipikat atas tanahnya.
- 5) Perolehan hak berupa sumbangan/hibah.
 - a) penerimaan sumbangan atau hibah atas tanah dari Pihak Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Hibah dengan mencantumkan luas tanah, nilai dan status kepemilikan hak atas tanah;
 - b) setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, Pemerintah Daerah segera menyelesaikan status/dokumen kepemilikan hak atas tanah;
 - c) penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan hukum lainnya, dituangkan dalam Berita Acara dan segera diselesaikan status/dokumen kepemilikan hak atas tanah;
- 6) Semua tanah yang pada saat ini statusnya masih dikuasai Pemerintah Daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dan untuk pengurusan sertipikatnya dibebankan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Daftar hasil pengadaan barang milik daerah.

Daftar hasil pengadaan barang milik daerah memuat catatan seluruh barang yang diadakan oleh semua SKPD dalam masa satu tahun anggaran.

Yang dimaksud dengan pengadaan di sini yaitu pengadaan atas beban APBD, dalam hubungan ini, setiap Kepala SKPD bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut kepada Bupati melalui pengelola.

Daftar hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis, dijadikan lampiran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Prosedur pembuatan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembantu pengelola menyediakan formulir yang diperlukan;
 - b. Formulir sebagaimana dimaksud huruf a dikirim/disampaikan kepada semua SKPD untuk diisi sesuai dengan barang-barang yang diadakan oleh unit yang bersangkutan;
 - c. Daftar sebagaimana dimaksud huruf b dibuat setiap 6 (enam) bulan;
 - d. Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dari semua SKPD dikirim ke pembantu pengelola paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, untuk disusun/dihimpun menjadi Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah.
3. Format Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan Barang/Jasa (Lampiran 3) dan Daftar Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Lampiran 4).

V. PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

1. Umum

Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara.

Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun sumbangan/bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan jenis barang untuk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan dalam pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2. Penerimaan

- a. Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan oleh penyimpan barang/ pengurus barang, untuk itu penerimaan barang oleh penyimpan barang/ pengurus barang dilaksanakan di gudang penyimpanan.
- b. Pelaksanaan penerimaan barang tersebut antara lain:
 - 1) dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian/ kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang;
 - 3) barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh panitia pemeriksa barang, sesuai dengan isi dokumen tersebut pada angka 2) di atas;
 - 4) pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan barang telah ditandatangani

oleh Panitia Pemeriksa Barang, penyimpan/pengurus barang dan penyedia barang/jasa;

- 5) apabila berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau syarat- syarat yang belum terpenuhi, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara barang yang dengan tegas membuat sebab-sebab daripada penerimaan sementara barang;
- 6) apabila kekurangan dan syarat-syarat tersebut pada angka 5) sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada angka 3), maka dapat dilaksanakan penerimaan barang sesuai ketentuan pada angka 4);
- 7) apabila barang telah diterima akan tetapi belum sempat diperiksa, maka penerimaan barang dilaksanakan dengan membuat tanda penerimaan barang sementara, dengan diberi catatan barang belum diteliti oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah;

c. Panitia Pemeriksa Barang.

- 1) Panitia Pemeriksa Barang (PPB) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan personalia melibatkan unsur teknis terkait;
- 2) Susunan Personalia Panitia Pemeriksa Barang tidak boleh dirangkap (tidak boleh sama) dengan susunan personalia panitia pengadaan untuk barang yang sama;
- 3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Panitia Pemeriksa Barang kepada Kepala SKPD dengan Keputusan Bupati;
- 4) Tugas Panitia Pemeriksa Barang.

Panitia Pemeriksa Barang Daerah setelah melaksanakan pekerjaannya membuat Berita Acara hasil pemeriksaan barang, jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat Perjanjian dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan harus segera mengambil tindakan penyelesaian, jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang /pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan.

Dalam hal disimpan sebagai barang titipan sebagaimana dimaksud harus dibuat Berita Acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud.

3. Penyimpanan

- a. Penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan sehingga dalam pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.
- b. Kegiatan penyimpanan barang milik daerah yaitu:
 - 1) menerima, menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman;
 - 2) menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pergudangan atas semua barang yang ada dalam gudang;
 - 3) melakukan stock opname secara berkala ataupun insidental terhadap barang persediaan yang ada didalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan;
 - 4) membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang.
- c. Penyimpan.

Penyimpan/pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan

barang milik daerah yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya.

Penyimpan barang dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan ketentuan jabatan, dimana jabatan penyimpan barang tersebut dapat dirangkap dengan pengurus barang sepanjang beban tugas/volume kegiatan tidak terlalu besar.

Setiap tahun pengelola menunjuk/menetapkan kembali penyimpan barang dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- 2) serendah-rendahnya menduduki golongan II dan setinggi-tingginya golongan III, mengacu kepada Undang-undang kepegawaian;
- 3) minimal mempunyai pengalaman dalam pengurusan barang/telah mengikuti kursus penyimpan barang;
- 4) mempunyai sifat dan akhlak yang baik, antara lain jujur, teliti, dan dapat dipercaya.

Dalam keputusan penunjukan/penetapan kembali penyimpan barang oleh pengelola sekaligus ditunjuk atasan langsungnya yang antara lain berkewajiban memberikan persetujuan atas setiap pengeluaran barang dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta ditetapkan pula jumlah atau besarnya insentif bagi penyimpan barang dimaksud.

Tugas dan tanggungjawab penyimpan/pengurus barang:

- 1) menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah ke unit pemakai;
- 2) mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya terdiri dari:
 - a) Buku barang inventaris;
 - b) Buku barang pakai habis;

- c) Buku hasil pengadaan;
 - d) Kartu barang;
 - e) Kartu persediaan barang.
- 3) menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang;
 - 4) membuat laporan mengenai barang yang diurusnya berdasarkan Kartu Persediaan Barang apabila diminta dengan sepengetahuan atasan langsungnya;
 - 5) membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidental mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola melalui atasan langsungnya;
 - 6) membuat perhitungan/pertanggung jawaban atas barang yang diurusnya;
 - 7) bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsung mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya;
 - 8) melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang.
 - 9) Dalam hal penyimpan barang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka untuk menjaga kelangsungan tugas/ pekerjaan penyimpan barang tersebut, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Penyimpan barang yang tidak mampu melaksanakan tugasnya, ditunjuk seorang pegawai lainnya sebagai penyimpan barang pengganti.

Penunjukan pegawai lainnya dilakukan oleh Pengelola Barang atas usul Kepala SKPD.

Penyerahan tugas tersebut harus dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola.

- b) Penyimpan/pengurus barang yang akan meninggalkan tugas sementara, dapat ditunjuk seorang pegawai lainnya untuk melakukan tugas sementara penyimpanan/pengurus barang.

Penyerahan tugas tersebut harus dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola, apabila Penyimpan Barang yang bersangkutan kembali melakukan tugasnya, maka penunjukan pengganti sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya dibuat berita acara dan harus dilaporkan kepada Pengelola.

d. Kewajiban Atasan Langsung Penyimpan.

- 1) Atasan langsung penyimpan/pengurus barang wajib secara berkala 6 (enam) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas penyimpanan barang, yaitu pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang.

Hasil pemeriksaan harus dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpanan barang yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada Pengelola dan tembusannya masing-masing untuk Kepala SKPD yang bersangkutan, Pembantu Pengelola dan Pengawas Fungsional Kabupaten.

Dalam hal atasan langsung penyimpan barang berhalangan maka Pengelola atau pejabat yang berwenang menunjuk pejabat lain sebagai atasan langsung penyimpan/pengurus barang.

- 2) Dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpanan barang, atasan langsung turut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

4. Penyaluran

Penyaluran merupakan kegiatan untuk melakukan pengiriman barang dari gudang ke unit kerja.

Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan.

Penyaluran barang milik daerah dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna dan kuasa pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

Kegiatan Penyaluran yaitu :

- a. Menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit kerja;
 - b. Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi; dan
 - c. Membuat laporan realisasi penyaluran barang milik daerah.
- #### 5. Contoh dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
- a. format Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa (Lampiran 5);
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 6);
 - c. Berita Acara Penerimaan Barang (Lampiran 7);
 - d. Buku Penerimaan Barang (Lampiran 8);
 - e. Buku Pengeluaran Barang (Lampiran 9);
 - f. Buku Barang Inventaris (Lampiran 10);
 - g. Buku Barang Pakai Habis (Lampiran 11);
 - h. Kartu Barang (Lampiran 12);
 - i. Kartu Persediaan Barang (Lampiran 13);
 - j. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris (Lampiran 14);
 - k. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis (Lampiran 15);
 - l. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (Lampiran 16);

- m. Berita Acara Serah Terima Gudang (Lampiran 17);
- n. Berita Acara Serah Terima Terdapat Selisih (Lampiran 18);
- o. Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementara (Lampiran 19);
- p. Berita Acara Pemeriksaan Barang Yang Berubah Keadaan (Lampiran 20);
- q. Berita Acara Pemeriksaan Barang karena Bencana Alam, Dicuri, Kebakaran (Lampiran 21); dan
- r. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (Lampiran 22).

VI. PENGGUNAAN

1. Umum

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah personil/pegawai pada SKPD;
- b. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- c. beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
- d. jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya.

Status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD.

2. Tata cara penetapan status penggunaan.
 - a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada SKPD yang bersangkutan kepada pengelola disertai usul penetapan status penggunaan;
 - b. pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, pengelola mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
 - d. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
 - e. penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan oleh Bupati;
 - f. atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada pengguna masing-masing.
3. Penyerahan tanah dan/atau bangunan.
 - a. pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
 - c. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan tersebut diatas dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan tersebut.
 - d. Format Daftar Barang yang Diterima Dari Pihak Ketiga (Lampiran 23), Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (Lampiran 24).

VII. PENATAUSAHAAN

1. Umum

- a. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
- b. Pengguna/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang milik daerah;
- c. dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola; dan
- d. dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.

2. Pembukuan

- a. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
- b. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format :
 - 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah (Lampiran 25);
 - 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin (Lampiran 26);
 - 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan (Lampiran 27);
 - 4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan (Lampiran 28);
 - 5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya (Lampiran 29);
 - 6) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan (Lampiran 30); dan
 - 7) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) (Lampiran 31).

- c. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

3. Inventarisasi

a. Peran dan Fungsi Inventarisasi.

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- 1) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- 2) usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; dan
- 3) menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan di catat serta didaftar dalam Buku Inventaris.

Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam:

- 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - 2) pengadaan.
 - 3) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - 4) penggunaan.
 - 5) penatausahaan;
 - 6) pemanfaatan.
 - 7) pengamanan dan pemeliharaan;
 - 8) penilaian;
 - 9) penghapusan;
 - 10) pemindahtanganan;
 - 11) pembinaan, pengawasan dan Pengendalian
 - 12) pembiayaan; dan
 - 13) tuntutan ganti rugi.
- b. Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, pengguna mencatat dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola.
- c. Barang milik daerah adalah barang yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain (Pihak Ketiga, antar lembaga Pemerintah, antara Pemerintah pusat dengan Daerah atau antar Pemerintah Daerah)
- d. Termasuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
- e. Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah kepada Bupati, dan Bupati berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut .

4. Verifikasi

- a. Verifikasi adalah proses pemeriksaan tentang kebenaran Laporan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pencocokan data-data yang ada dengan keadaan fisik barang tersebut.
- b. Verifikasi atas barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara :
 1. Rutin, yang dilakukan satu tahun sekali
 2. Berkala, yang dilakukan setiap lima tahun sekali bersamaan dengan sensus barang daerah dan setiap ada perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja lingkungan Kabupaten Pekalongan.
 3. Insidental, yang dilakukan setiap ada pergantian Kepala SKPD atau setiap ada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang atau penggelapan baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat
- c. Verifikasi dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bersama-sama dengan aparat pengawas fungsional (inspektorat) untuk semua barang inventaris. Sedangkan untuk Verifikasi khusus tanah dan bangunan, dibentuk Panitia Khusus Verifikasi Tanah dan Bangunan dengan Keputusan Pengelola dengan susunan personalia minimal sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pekalongan selaku Ketua Panitia.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Aset selaku Sekretaris.
 3. Kepala Seksi inventarisasi dan verifikasi Aset selaku anggota
 4. Unsur Seksi inventarisasi dan verifikasi Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Anggota.
 5. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan sebagai Anggota.

6. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pekalongan sebagai Anggota.
 7. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan sebagai Anggota
 8. Unsur Dinas Terkait sebagai Anggota Tidak Tetap.
 9. Unsur Kecamatan terkait sebagai Anggota Tidak Tetap.
- d. Prosedur dan Tata Cara Verifikasi
1. Untuk Verifikasi Tanah dan Bangunan
 - a. Dibentuk Panitia
 - b. Dilakukan Inventarisasi tanah dan/atau bangunan.
 - c. Dilakukan Penelusuran Dokumen-dokumen bukti kepemilikan.
 - d. Dilakukan pengecekan lokasi.
 - e. Dilakukan Pemasangan patok/tanda batas.
 - f. Dilakukan pengukuran oleh instansi yang berwenang.
 - g. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 - h. Membuat Laporan Hasil Verifikasi.
 2. Untuk Verifikasi Barang Inventaris Lainnya
Dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bersama-sama dengan Aparat Pengawas Fungsional dengan cara mencocokkan data inventaris dengan keadaan sebenarnya (keadaan dilapangan) dan menuangkannya dalam Berita Acara atau Laporan Hasil Verifikasi.
 3. Setiap ada pergantian Kepala SKPD/Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib dilakukan Verifikasi Aset-aset yang dikuasainya.
5. Pelaporan
- a. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.

- b. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati melalui pengelola.
- c. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
- d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas, digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.
- e. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.
- f. Buku Induk Inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
- g. Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada :
 - 1) Laporan Mutasi Barang; dan
 - 2) Daftar Mutasi Barang.
- h. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui pengelola.
- i. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).
- j. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.

- k. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi) sebagaimana dimaksud pada huruf J, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - l. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, type, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang.
 - m. Format Laporan Pengurus Barang :
 - 1) Buku Inventaris (Lampiran 32);
 - 2) Rekap Buku Inventaris (Lampiran 33);
 - 3) Laporan Mutasi Barang (Lampiran 34);
 - 4) Daftar Mutasi Barang (Lampiran 35);
 - 5) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (Lampiran 36);
 - 6) Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus (Lampiran 37);
 - 7) Daftar Barang Milik Daerah yang Digunausahakan (Lampiran 38).
6. Penggolongan barang milik daerah
- a. Barang milik daerah digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu:
 - 1) Tanah
Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
 - 2) Peralatan dan Mesin
 - a) alat-alat besar
Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan lain-lain sejenisnya.
 - b) alat-alat angkutan

Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya.

c) alat-alat bengkel dan alat ukur

Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya.

d) alat-alat pertanian/peternakan

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

e) alat-alat kantor dan rumah tangga

Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.

f) alat studio dan alat komunikasi

Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya.

g) alat-alat kedokteran

Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya.

h) alat-alat laboratorium

Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya.

i) alat-alat keamanan

Senjata Api, Peralatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejenisnya.

3) Gedung dan bangunan

a) bangunan gedung

Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung

Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis.

b) bangunan monumen

Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.

4) Jalan, irigási dan jaringan

a) jalan dan jembatan

Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya.

b) bangunan air/irigasi

Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kotor dan Bangunan Air lain yang sejenis.

c) instalasi

Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya.

d) jaringan

Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.

5) Aset tetap lainnya

a) buku dan perpustakaan

Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.

b) barang bercorak kesenian/kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah

Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.

c) hewan/ternak dan tumbuhan

Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya.

Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

6) Kontruksi dalam pengerjaan

b. Pelaksanaan Inventarisasi

1) Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni :

a) Pelaksanaan pencatatan.

b) Pelaksanaan pelaporan.

2) Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut:

a) Kartu Inventaris Barang (KIB A,B, C, D, E dan F);

b) Kartu Inventaris Ruangan;

c) Buku Inventaris;

d) Buku Induk Inventaris.

3) Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu :

a) Buku Inventaris dan Rekap.

b) Daftar Mutasi Barang dan Rekap.

4) Fungsi dari buku dan kartu inventaris baik untuk kegiatan pencatatan maupun untuk kegiatan pelaporan sebagaimana di maksud di bawah ini :

a) Buku Induk Inventaris (BII) merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris sedangkan buku inventaris adalah himpunan catatan data

teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil sensus ditiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.

Pembantu Pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah.

Untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat (up to date) maka dilakukan melalui Sensus Barang Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

Tata cara Pelaksanaan Sensus Barang sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan / pedoman tersendiri.

Prosedur pengisian Buku Induk Inventaris, adalah sebagai berikut :

- 1) Pengguna melaksanakan inventarisasi barang yang dicatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, dan F) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) secara kolektif atau secara tersendiri per jenis barang rangkap 2 (dua).
- 2) Pengguna barang bertanggung-jawab dan menghimpun KIB dan KIR dan mencatatnya dalam Buku Inventaris yang datanya dari KIB A, B, C, D, E dan F serta membuat KIR dimasing-masing ruangan.
- 3) Pembantu pengelola barang mengkompilasi Buku Inventaris menjadi Buku Induk Inventaris
- 4) Rekapitulasi Buku Induk Inventaris ditandatangani oleh pengelola atau pembantu pengelola.
- 5) Buku Induk Inventaris berlaku untuk 5 (lima) tahun, yang selanjutnya dibuat kembali dengan

tata-cara sebagaimana telah diuraikan di atas (Sensus Barang).

b) Kartu Inventaris Barang (KIB)

Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

KIB terdiri dari :

- (1) Kartu Inventaris Barang (Tanah);
- (2) Kartu Inventaris Barang (Mesin dan Peralatan);
- (3) Kartu Inventaris Barang (Gedung dan Bangunan);
- (4) Kartu Inventaris Barang (Jalan, Irigasi dan Jaringan);
- (5) Kartu Inventaris Barang (Aset Tetap Lainnya);
- (6) Kartu Inventaris Konstruksi dalam Pengerjaan;

c) Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu Inventaris Ruangan ini harus dipasang di setiap ruangan kerja, pemasangan maupun pencatatan inventaris ruangan menjadi tanggung jawab pengurus barang dan Kepala Ruangan disetiap SKPD.

d) Daftar Rekapitulasi Inventaris.

Daftar Rekapitulasi Inventaris disusun oleh pengelola/ pembantu pengelola dengan mempergunakan bahan dari rekapitulasi Inventaris barang yang disampaikan oleh pengguna.

e) Daftar Mutasi Barang.

Daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang dan/atau yang bertambah dalam suatu jangka waktu tertentu (1 semester dan 1 tahun).

Mutasi barang terjadi karena :

1) Bertambah, disebabkan:

- (a) Pengadaan baru karena pembelian.
- (b) Sumbangan atau hibah.
- (c) Tukar-menukar.
- (d) Perubahan peningkatan kualitas (guna susun).

2) Berkurang, disebabkan :

- (a) Dijual/dihapuskan.
- (b) Musnah/Hilang/Mati.
- (c) Dihilangkan/disumbangkan.
- (d) Tukar menukar/ruislag /tukar guling/dilepaskan dengan ganti rugi.

c. Aparat pelaksana inventarisasi.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, pencatatan dan pelaporan, pengelola menetapkan pengurus barang pada masing-masing SKPD.

d. Pelaksanaan sensus barang daerah

1). untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat (up to date), harus melalui sensus barang daerah. Barang yang akan disensus adalah seluruh barang milik Pemerintah yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- (a) Barang milik daerah, termasuk barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.

- (b) Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2). Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini akan diuraikan hal-hal pokok, yang meliputi tahapan pelaksanaan, cara penggunaan kode barang dan pengisian formulir sebagai berikut:
 - (a) Tahapan Sensus Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan sensus barang milik daerah, dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pada tahap persiapan, Bupati menetapkan Surat Keputusan Kode Lokasi dan Kode Barang (apabila ada perubahan SOTK dan penambahan jenis barang) dan menetapkan juknis Sensus Barang Daerah yang disiapkan oleh pengelola , selanjutnya masing-masing SKPD melaksanakan pengisian KIB dan KIR dilingkungannya. Pelaksanaan pengisian KIB dan KIR tersebut dilaksanakan sekaligus dengan penulisan Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang pada masing-masing barangnya sebelum pelaksanaan sensus.

KIR dan KIB dimaksud merupakan data pendukung utama pada saat pelaksanaan Sensus Barang Daerah dimaksud.

- (b) Dalam tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah, masing-masing pengguna/kuasa pengguna harus melaksanakan pengisian formulir Buku Inventaris.

Tahap persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah, yang akan diuraikan dibawah ini meliputi mekanisme dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah sebagai berikut :

- a. Mekanisme :

Dalam pelaksanaan pengumpulan data Sensus Barang Daerah dimulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang.

Semua pengguna/kuasa pengguna melaksanakan Sensus Barang Daerah dengan tahapan dimulai dari Satuan Kerja/Sub Unit terendah sebagai berikut :

a. Kelurahan

Setiap Kelurahan mengisi :

1). Kartu Inventaris Barang (KIB)

- KIB A : Tanah
 - KIB B : Mesin dan Peralatan
 - KIB C : Gedung dan Bangunan
 - KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - KIB E : Aset Tetap Lainnya
 - KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
- Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB, masing-masing rangkap 2 (dua).

2). Kartu Inventaris Ruang (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.

3). Buku Inventaris Barang milik daerah yang berada pada Kelurahan yang bersangkutan rangkap 4 (empat) dan setelah diisi lembar ke-4 disimpan di Kelurahan sebagai arsip (Buku Inventaris Kelurahan), sedangkan lembar ke-1 s/d 3 disampaikan/ dikirimkan ke Kecamatan.

4). Buku Inventaris Kelurahan, yakni :

- Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 4 rangkap
- Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 4 rangkap.
- Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 4 rangkap (kalau ada).

Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di

Kelurahan tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

b. Kecamatan.

Setiap Camat mengisi :

1) Kartu Inventaris Barang (KIB).

- KIB A : Tanah
 - KIB B : Mesin dan Peralatan
 - KIB C : Gedung dan Bangunan
 - KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - KIB E : Aset Tetap Lainnya
 - KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
- Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua).

2) Kartu Inventaris Ruang (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.

3) Buku Inventaris barang yang berada di Kecamatan yang bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku Inventaris dari semua Satuan Kerjanya (Kelurahan) menjadi Buku Inventaris Kecamatan. Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya.

Lembar ke 3 disimpan di Kantor Camat sebagai arsip (Buku Inventaris Kecamatan), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirimkan/disampaikan ke Kabupaten melalui pengelola/pembantu pengelola.

4) Buku Inventaris Kecamatan, yakni :

- Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap.
- Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 3 rangkap.

- Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada).
 - Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Kecamatan tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.
- c. Sekolah Negeri (SDN/SLTP, SMU).
- Setiap Kepala SDN Satuan Kerja mengisi :
- 1). Kartu Inventaris Barang KIB):
 - KIB A : Tanah
 - KIB B : Mesin dan Peralatan
 - KIB C : Gedung dan Bangunan
 - KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan

 - KIB E : Aset Tetap Lainnya
 - KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua).
 - 2). Kartu Inventaris Ruang (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
 - 3). Buku Inventaris barang yang berada di SDN yang bersangkutan dalam rangkap 5 (lima), lembar ke-5 pada SDN/Satuan Kerja yang bersangkutan sebagai arsip (Buku Inventaris SDN/Satuan Kerja). Sedangkan lembar ke 1 s/d 4 dikirimkan/disampaikan ke kuasa pengguna.
 - 4). Buku Inventaris SDN, yakni :
 - Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 5 rangkap.
 - Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 5 rangkap.

- Buku Inventaris barang milik/kekayaan negara sebanyak 5 rangkap (kalau ada).

masing-masing dicatat secara terpisah sesuai kepemilikan barangnya, kalau ada di SDN tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

d. Kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis Daerah.

Setiap kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis daerah mengisi :

1). Kartu Inventaris Barang (KIB) .

- KIB A : Tanah
- KIB B : Mesin dan Peralatan
- KIB C : Gedung dan Bangunan
- KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
- KIB E : Aset Tetap Lainnya
- KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan

sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua).

2). Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.

3). Buku Inventaris barang yang berada di kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Buku Inventaris dari semua Satuan Kerjanya menjadi Buku Inventaris kuasa pengguna (UPTD). Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya.

Lembar ke 4 disimpan di kuasa pengguna/UPTD sebagai arsip,

sedangkan lembar ke 1 s/d 3 dikirimkan/disampaikan ke SKPD yang bersangkutan.

4). Buku Inventaris kuasa pengguna/UPTD, yakni :

- Buku Inventaris Barang Daerah Propinsi sebanyak 4 rangkap.
- Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 4 rangkap.
- Buku Inventaris Barang Milik/ Kekayaan Negara sebanyak 4 rangkap (kalau ada).

Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di kuasa pengguna/UPTD tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

e. Pengguna barang (SKPD).

Setiap SKPD mengisi :

1). Kartu Inventaris Barang (KIB) .

- KIB A : Tanah
 - KIB B : Mesin dan Peralatan
 - KIB C : Gedung dan Bangunan
 - KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - KIB E : Aset Tetap Lainnya
 - KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
- sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua).

2). Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.

3). Buku Inventaris barang yang berada di SKPD yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Buku Inventaris dari semua kuasa pengguna/UPTD menjadi Buku

Inventaris SKPD. Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya.

Lembar ke 4 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 dikirimkan/disampaikan ke pengelola.

- 4). Buku Inventaris SKPD, yakni :
 - Buku Inventaris Barang Daerah Propinsi sebanyak 3 rangkap.
 - Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 3 rangkap.
 - Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada).

Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di SKPD tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

- f. Kuasa pengguna (Kepala Bagian) pada Sekretariat Daerah mengisi :

- 1). Kartu Inventaris Barang (KIB) :
 - KIB A : Tanah
 - KIB B : Mesin dan Peralatan
 - KIB C : Gedung dan Bangunan
 - KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - KIB E : Aset Tetap Lainnya
 - KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan

sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing dalam rangkap 2 (dua).
- 2). Kartu Inventaris Ruang (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
- 3). Buku Inventaris barang yang berada di kuasa pengguna (Bagian) Setda dibuat dalam rangkap 3 (tiga) barang-barang

yang ada pada Bagian dan setelah diisi, Lembar ke 3 (tiga) disimpan di Bagian Setda sebagai arsip (Buku Inventaris Bagian Setda), sedangkan lembar ke 1 dan 2 dikirimkan/disampaikan ke Pengguna Barang Setda.

- 4). Buku Inventaris Unit/Satuan Kerja Setda Kabupaten yakni :
- Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap
 - Buku Inventaris Barang Kabupaten sebanyak 3 rangkap.
 - Buku Inventaris Barang milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada).

masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Kuasa pengguna Setda Kabupaten, begitu juga untuk KIB dan KIR.

g. Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah mengisi :

- 1). Kartu Inventaris Barang (KIB).
 - KIB A : Tanah
 - KIB B : Mesin dan Peralatan
 - KIB C : Gedung dan Bangunan
 - KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - KIB E : Aset Tetap Lainnya
 - KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing dalam rangkap 2 (dua).
- 2). Kartu Inventaris Ruang (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
- 3). Buku Inventaris barang yang berada pada Bagian Sekretariat dalam rangkap

3 (tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku Inventaris dari semua kuasa pengguna (Bagian) Setda menjadi Buku Inventaris Sekretariat Daerah. Buku-buku Inventaris Sekretariat Daerah dimaksud dibuatkan Rekapitulasi.

Lembar ke 2 (tiga) disimpan di pengelola/Pembantu Pengelola, sedangkan lembar ke 1 dikirim/disampaikan ke Bupati.

4). Buku Inventaris Sekretariat Daerah, yakni :

- Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 2 rangkap.
- Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 2 rangkap.
- Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 rangkap (Kalau ada).

Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Sekretariat Daerah tersebut begitu juga untuk KIB dan KIR.

h. Pengelola Barang Milik Daerah.

- 1). Menerima Buku Inventaris dari semua SKPD (termasuk Satuan Kerjanya) dalam rangkap 2 (dua), dan
- 2). Menerima Buku Inventaris dari Bagian Setda Kabupaten (kuasa pengguna). Dalam rangkap 2 (dua).

Buku-buku Inventaris tersebut dikompilasi pengelola/Pembantu Pengelola sebagai pusat Inventarisasi, maka diperoleh :

- Buku Induk Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 2 rangkap ke 1

(satu) asli disimpan di Kabupaten ke 2 (dua) dikirim /disampaikan ke Provinsi,

- Buku Inventaris Barang Provinsi, sebanyak 2 rangkap, ke 1 (satu) asli disampaikan ke Provinsi ke 2 (dua) disimpan di Kabupaten
- Buku Inventaris Barang milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 (dua) rangkap (kalau ada). Ke 1 (satu) asli disampaikan ke masing-masing Departemen, ke 2 (dua) disimpan di Kabupaten.

Buku Induk Inventaris Barang Kabupaten dibuat daftar Rekapitulasi Induk untuk menggambarkan Jumlah Barang Kabupaten,

Sedangkan Buku Inventaris Barang-barang Provinsi, Barang Milik/Kekayaan Negara dibuatkan pula Daftar Rekapitulasinya masing-masing rangkap 2 (dua), untuk memudahkan Provinsi untuk mengumpulkan/mengkompilasi daftar rekapitulasi tersebut di Provinsi untuk disampaikan masing-masing :

(a) Menteri Dalam Negeri; dan

(b) Arsip (di Provinsi yang bersangkutan).

- i. Khusus untuk barang milik Pusat dalam hal ini Departemen Lain kalau sudah ada aturan / petunjuk dari Departemen yang bersangkutan, maka pengguna/kuasa pengguna tidak perlu mencatat/menginventaris barang tersebut berdasarkan petunjuk ini, tetapi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Departemen pemilik barang tersebut, dan dikirimkan/dilaporkan kepada Departemen bersangkutan, dan tembusannya harus disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola cq. Pembantu Pengelola.

b. Tahapan kegiatan sensus

Pelaksanaan kegiatan sensus, dilakukan 2 (dua) tahap kegiatan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan.

- 1). Pembentukan Panitia Sensus Barang Daerah oleh Pengelola;
- 2). Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Kode Lokasi dan Kode Barang
- 3). Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
- 4). Penataran Petugas Pelaksanaan Sensus Barang Kabupaten dilaksanakan pada masing-masing Daerah;
- 5). Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan.
- 6). Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan.

- 1). Penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah;
- 2). Melaksanakan sensus barang daerah yang masing-masing di SKPD/wilayah dengan mengisi KIB dan KIR;
- 3). Penyelesaian hasil sensus barang milik daerah dengan menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada atasan;
- 4). Pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh unit/Satuan Kerja;
- 5). Panitia Sensus mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dari SKPD dengan cara

mencocokkan/verifikasi data yang dikirim dengan kenyataan di lapangan;

- 6). Apabila pencocokan/Verifikasi data tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan secara menyeluruh, Panitia dapat melaksanakan pencocokan/verifikasi data dengan mengambil sampel/ccontoh beberapa SKPD yang dinilai dapat mewakili, atau jika ada kejanggalan dalam pelaporan/pengisian data dari SKPD.
- 7). Membuat Buku Induk Inventaris Propinsi/Kabupaten;
- 8). Melaporkan hasil sensus barang Kabupaten kepada Departemen Dalam Negeri.

3). Kodefikasi

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.

Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.

Kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Barang milik pemerintah Kabupaten (12).
- b. Barang milik pemerintah provinsi (11).
- c. Barang milik pemerintah pusat (BM/KN (kalau ada 00)).

Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah, setiap barang daerah harus diberi nomor kode sebagai berikut :

a. Nomor Kode Lokasi

- 1) Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten,

bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.

- 2) Nomor Kode Lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah.
- 3) Nomor Kode urutan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 39.
- 4) Nomor Kode urutan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran 40.
- 5) Nomor Kode Lokasi ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pengelompokkan bidang yang terdiri dari 22 bidang, yaitu:

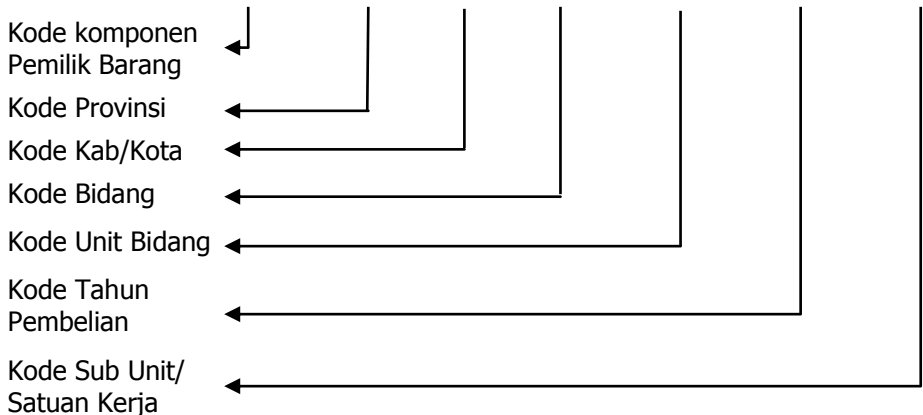
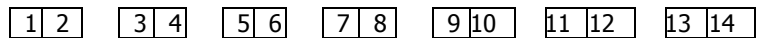
- (1) Sekwan/DPRD;
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota;
- (3) Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- (4) Sekretariat Daerah;
- (5) Bidang Kimpraswil/PU;
- (6) Bidang Perhubungan;
- (7) Bidang Kesehatan;
- (8) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (9) Bidang Sosial;
- (10) Bidang Kependudukan;
- (11) Bidang Pertanian;
- (12) Bidang Perindustrian;
- (13) Bidang Pendapatan;
- (14) Bidang Pengawasan;
- (15) Bidang Perencanaan;
- (16) Bidang Lingkungan Hidup;
- (17) Bidang Pariwisata;

- (18) Bidang Kesatuan Bangsa;
- (19) Bidang Kepegawaian;
- (20) Bidang Penghubung;
- (21) Bidang Komunikasi, informasi dan dokumentasi;
- (22) Bidang BUMD.

6) Kecamatan diberi Nomor Kode mulai dari nomor urut 50 (lima puluh) dan seterusnya sesuai jumlah kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

7) Contoh nomor kode lokasi.

angka atau digit nomor kode lokasi ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar.



- 8) digit 1 dan 2, Kode komponen kepemilikan barang
- Penulisan kode komponen kepemilikan barang sebagai berikut :
- a. Barang milik Pemerintah Pusat dengan Nomor Kode 00
 - b. Barang milik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Nomor Kode 11

c. Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Nomor Kode 12.

9) digit 3 dan 4, Kode Provinsi.

Provinsi diberi Nomor Kode mulai dari Nomor 01 sampai dengan 33 (dstnya), sesuai dengan jumlah Provinsi yang ada.

10) digit 5 dan 6, Kode Kabupaten

11) digit 7 dan 8, kode bidang

Kode bidang ini merupakan pengelompokan Bidang Tugas yang terdiri dari 22 bidang.

12) Digit 9 dan 10, kode SKPD.

Kode Unit merupakan penjabaran dari Bidang Tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai struktur organisasi di masing masing Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Penetapan nomor urut kode unit/SKPD di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah.

13) Digit 11 dan 12, Tahun Pembelian/Pengadaan/ Pembangunan.

Nomor Kode Tahun pembelian/pengadaan barang dituliskan 2 angka terakhir (misalnya tahun pembelian/perolehan 1997, maka ditulis Nomor Kodenya 97, tahun pembelian/perolehan tahun 2002 ditulis 02 tahun 2005 ditulis 05 dan seterusnya.

Barang yang tidak diketahui Tahun Pembelian/Perolehannya, supaya dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, type, merk, bahan, cc dsb dan penetapan prakiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Pengurus barang.

14) Digit 13 dan 14, Kode Sub Unit/Satuan Kerja.

Kode Sub Unit/Satuan Kerja untuk masing-masing SKPD diberi Nomor urut Kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari Nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Nomor Kode Barang

a) Nomor kode barang diklasifikasikan kedalam 6 (enam) golongan yaitu:

- (1) Tanah.
- (2) Mesin dan Peralatan.
- (3) Gedung dan Bangunan.
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (5) Aset Tetap Lainnya.
- (6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

b) Penggolongan barang terbagi atas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelompok/Jenis Barang.

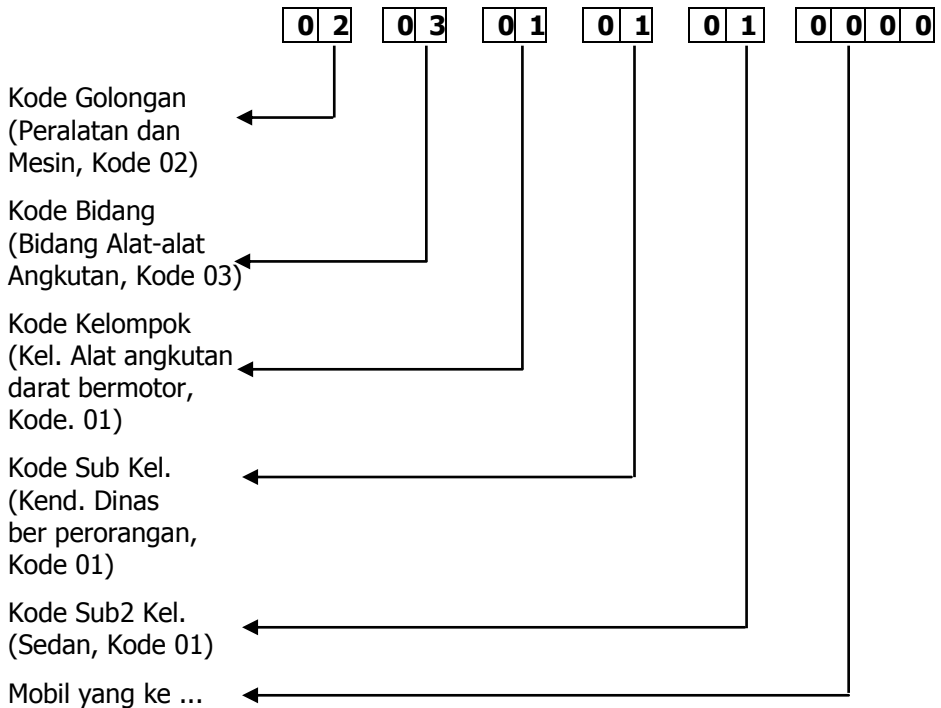
c) Nomor Kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok/jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran 41.

d) Nomor kode barang terdiri atas 14 (empat belas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus sebagai berikut:

Untuk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenis dengan cepat, perlu 2 angka di depan/dicari Nomor Kode Golongan Barangnya, kemudian baru dicari Nomor Kode Bidang, Nomor Kode Kelompok, Nomor Kode Sub Kelompok, Nomor Kode Sub-Sub Kelompok/jenis barang dimaksud.

Contoh 1, kode barang mobil Sedan.

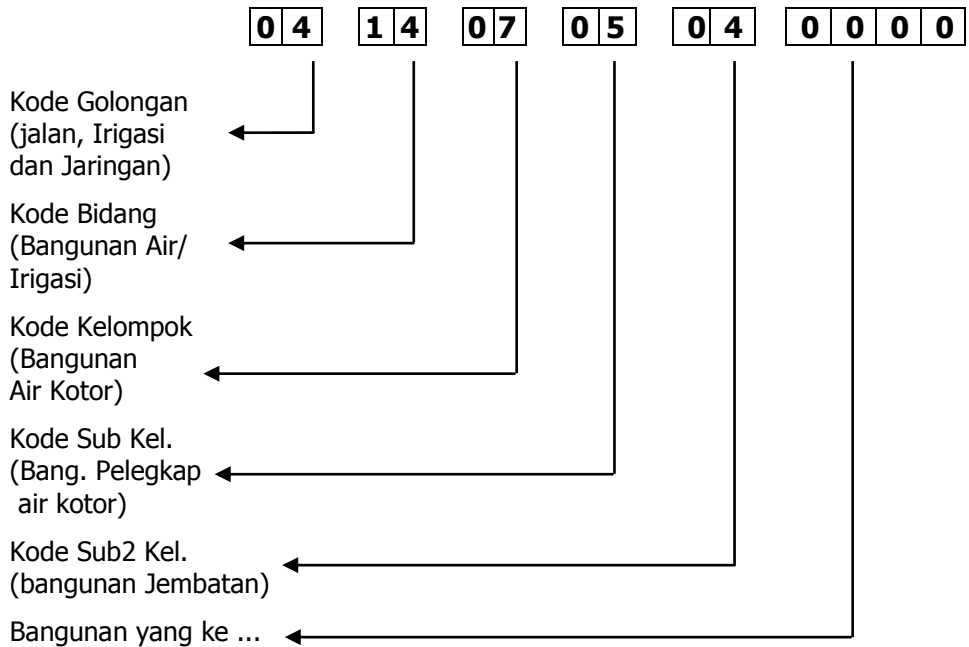
Untuk mencari nomor kode barang mobil sedan adalah sebagai berikut :



Cara penulisan : **02.03.01.01.01.0000**

1. Nomor kode 02; nomor kode golongan peralatan dan mesin;
2. Nomor kode 03; mobil sedan bidang alat-alat angkutan;
3. Nomor kode 01; kelompok alat angkutan darat bermotor;
4. Nomor kode 01; sub kelompok kendaraan dinas bermotor perorangan;
5. Nomor kode 01; sub-sub Kelompok/jenis barang;
6. Nomor Kode Register.

Contoh 2: Bangunan Jembatan.



Cara penulisan : **04.14.07.05.04.0000**

- (1) Nomor kode 04; nomor kode golongan jalan, irigasi dan jaringan;
- (2) Nomor kode 14; bangunan air/irigasi;
- (3) Nomor kode 07; kelompok bangunan air kotor;
- (4) Nomor kode 05; sub kelompok bangunan pelengkap air kotor;
- (5) Nomor kode 04; sub-sub Kelompok/jenis barang bangunan jembatan;
- (6) Nomor kode register.

c. Nomor Register :

Nomor register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harganya sama seperti

meja dan kursi jumlahnya 150, maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register, ditulis : 0001 s/d 0150.

Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, type, merk, jenis berbeda, maka nomor registernya dicatat tersendiri untuk masing-masing barang.

d. Lain-lain.

1. Cara pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang yang belum ada Nomor Kode jenis barangnya, supaya mempergunakan Nomor Kode jenis barang "Lain-lain " dari Sub kelompok barang yang dimaksud atau dibakukan oleh Bupati masing-masing dengan mengikuti nomor urut jenis barang lain-lain.
2. Barang milik Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah) tetap menjadi milik Pemerintah Daerah, oleh karena itu semua barang inventaris yang dipisahkan, diperlakukan sama dengan barang inventaris milik Pemerintah Daerah.
3. Tidak termasuk barang milik daerah tersebut di atas yaitu barang usaha/barang yang diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah tersebut.
4. Kode Lokasi dan Kode Barang ditetapkan dengan keputusan Bupati menyesuaikan dengan perkembangan jenis barang dan lokasi sesuai dengan perubahan SOTK.

e. Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan.

1. Kode Barang dan tanda kepemilikan harus dicantumkan pada setiap barang Inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI, KIB dan KIR.
2. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat.

3. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) ditempatkan pada bagian badan yang mudah dilihat.
4. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di tempat yang mudah dilihat.
5. Kode Barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran 15 x 25 Cm, sedangkan untuk tanah kosong pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60x90 cm.
6. Pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum.

VIII. PEMANFAATAN

a. Umum

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

b. Pengertian pemanfaatan.

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan lagi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan.

Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati, selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Dalam hal Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah sedangkan pengelolaan / Pemanfaatannya dilaksanakan oleh Kelurahan.

1. Pinjam Pakai

- a) Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada instansi pemerintah, antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
- b) Pinjam pakai selain hal tersebut di atas, dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbatas pada komisi-komisi dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kendaraan tersebut sebagai kendaraan dinas operasional (pool)
- c) Syarat-syarat pinjam pakai barang milik daerah adalah :
 - 1) barang milik daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD;
 - 2) barang milik daerah yang dipinjamkaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya;
 - 3) pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok dan fungsi dari instansi atau SKPD;
 - 4) barang milik daerah yang dipinjamkaikan harus merupakan barang yang tidak habis pakai;

- 5) peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman;
 - 6) peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang;
 - 7) jangka waktu pinjam pakai maksimal selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali;
 - 8) pengembalian barang milik daerah yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap;
- d) Pinjam pakai barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar Pemerintah.
 - e) Pinjam pakai barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.
 - f) Surat Perjanjian Pinjam Pakai dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - g) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
 - 2) jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - 3) jangka waktu pinjam pakai;
 - 4) tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman.
 - 5) persyaratan lain yang dianggap perlu.

2. Sewa

- a) Sewa merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemanfaatan kepada Pihak Ketiga, dalam hubungan sewa menyewa tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- b) Sewa dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) sewa barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.
 - 2) untuk sementara waktu barang milik daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD.
 - 3) barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain/Pihak Ketiga;
 - 4) jenis-jenis barang milik daerah yang disewakan ditetapkan oleh Bupati.
 - 5) besaran sewa ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Harga Pasaran Umum atau kajian dari SKPD terkait dan bila diperlukan Bupati membentuk Tim Penaksir yang terdiri dari SKPD terkait.
 - 6) Ijin sewa dikeluarkan oleh pengelola/pengguna yang melaksanakan sewa.
 - 7) Dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa harus ditetapkan :
 - (a) jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan.
 - (b) biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung-jawab penyewa.
 - (c) persyaratan lain yang dianggap perlu.
- c) jenis barang milik daerah yang dapat disewakan, antara lain:
- 1) Mess/Wisma dan sejenisnya.
 - 2) Gudang dan atau bangunan eks kantor dan eks rumah dinas dan atau sejenisnya.
 - 3) Toko/Kios,
 - 4) Tanah.
 - 5) Kendaraan

- 6) Alat-alat berat.
- d) Prosedur penyewaan.
 - 1) pengusulan penyewaan.

Kepala SKPD mengusulkan kepada Bupati melalui pengelola atas barang milik daerah yang akan disewakan, dalam pengusulan tersebut dilengkapi data barang dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk Panitia Penyewaan.
 - 2) kewenangan penyewaan.
 - (a) Penyewaan tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan lagi oleh pengguna dan telah diserahkan pengelolaannya kepada pengelola, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Surat Perjanjian sewa menyewa dikeluarkan oleh Pembantu Pengelola atas nama Bupati;
 - (b) penyewaan tanah dan/atau bangunan yang pengelolaannya belum diserahkan kepada pengelola serta selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Surat Perjanjian sewa menyewa dikeluarkan oleh Pengguna atas nama Pengelola.
 - (c) Penyewaan Gudang, Gedung Ex Kantor, Gedung Pertemuan Umum (GPU), Mess/Wisma dan sejenisnya yang pengelolaannya telah diserahkan kepada pengelola dilaksanakan oleh Pengelola melalui Pembantu Pengelola (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset). Surat Perjanjian sewa menyewa dikeluarkan oleh Pembantu Pengelola atas nama Bupati;
 - (d) Penyewaan Toko dan Kios/Los pasar dilakukan oleh SKPD terkait.

(e) Penyewaan Tanah yang masih digunakan untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi atau belum diserahkan pengelolaannya kepada pengelola :

- (1) Sewa Tanah Pengairan dilakukan oleh Dinas Pengairan, Kebersihan dan Pertambangan.
- (2) Sewa Tanah Tambak dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Sewa Lapangan Olah raga (Stadion, Lapangan Tenis, dll), Vila/Penginapan, Obyek Wisata, Taman Hiburan Rakyat, Gedung Kesenian dan sejenisnya dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (4) Sewa Lapangan Alun-alun Kajen dan tanah dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (5) Sewa tanah Eks Bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan dilaksanakan oleh Kelurahan yang bersangkutan.

Kewenangan Sewa tanah lainnya yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, dilakukan berdasar pada keterkaitan Tugas Pokok Fungsi masing-masing SKPD.

- (f) Penyewaan kendaraan seperti Bus dan Truk dilakukan oleh SKPD dimana kendaraan tersebut masuk sebagai daftar inventarisnya.
- (g) Penyewaan Mobil Jenazah dan Ambulance dilakukan oleh SKPD dimana kendaraan tersebut masuk sebagai daftar inventarisnya.
- (h) Penyewaan Alat-alat Berat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

3) Batasan Penyewaan.

Dalam Keputusan tentang penyewaan barang milik daerah harus memuat secara tegas antara lain :

- (a) data mengenai barang milik daerah yang akan disewakan.
- (b) ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
- (c) Surat Perjanjian Sewa Menyewa memuat antara lain:
 - (1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - (2) data barang milik daerah yang disewakan;
 - (3) hak dan kewajiban dari pada kedua belah pihak;
 - (4) jumlah/besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga;
 - (5) jangka waktu sewa-menyewa;
 - (6) sanksi;
 - (7) ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang disewakan kepada Pihak Penyewa.
- (d) hasil penyewaan barang milik daerah disetorkan ke kas daerah secara bruto melalui Bendahara penerimaan SKPD apabila perjanjian sewa dilakukan oleh Pengguna atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset apabila perjanjian sewa dilakukan oleh Pembantu Pengelola.
- (e) segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan barang milik daerah ditanggung oleh Pihak Penyewa.

(f) Jangka waktu penyewaan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.

3. Kerjasama Pemanfaatan

- a) Kerjasama pemanfaatan terhadap barang milik daerah dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi dayaguna dan hasil guna barang milik daerah dan dalam rangka menambah/meningkatkan penerimaan daerah;
- b) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati dan sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna dan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- c) Kewenangan penetapan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan pengguna, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d) Kewenangan penetapan kerjasama pemanfaatan sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola;
- e) Penetapan dan kewajiban mitra kerjasama.
 - 1) mitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan melalui tender/lelang dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga;
 - 2) dalam hal penetapan mitra kerjasama dilakukan secara lelang, Bupati membentuk Panitia lelang yang terdiri dari unsur terkait yang berjumlah ganjil.
 - 3) pengecualian sebagaimana pada angka 1), dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan yang inisiatif kerja sama berasal dari pihak ketiga

(calon mitra) dan kegiatan yang bersifat khusus seperti penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk keperluan kebun binatang (pengembang biakan/pelestarian satwa langka), pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga;

- 4) mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
- 5) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan antara lain :
 - (a) Nilai tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerjasama ditetapkan sesuai NJOP dan/atau harga pasaran umum, apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada.
 - (b) Kegiatan kerjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangan.
 - (c) Besaran investasi dari mitra kerja
 - (d) Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 6) jangka waktu pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
- 7) mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan obyek kerjasama pemanfaatan yaitu tanah dan/atau bangunan;

- 8) biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 9) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga;
- f) Permohonan kerjasama pemanfaatan ditujukan kepada Panitia Tender/lelang dan dilengkapi data-data sebagai berikut :
- b) akte pendirian;
 - c) memiliki SIUP sesuai bidangnya;
 - d) telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
 - e) mengajukan proposal;
 - f) memiliki keahlian dibidangnya;
 - g) memiliki modal kerja yang cukup; dan
 - h) Data teknis :
 - o Tanah : Lokasi/alamat, luas, status , penggunaan saat ini.
 - o Bangunan : Lokasi/alamat, luas,status/IMB, kondisi.
 - o Rencana penambahan bangunan gedung dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan:
 - o - KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
 - o - KLB (Koefisien Luas Bangunan).
- g). Tugas Panitia.
- 1) Membuat Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelelangan
 - 2) Melaksanakan pengumuman lelang;
 - 3) Melaksanakan penjelasan (aanwijzing) pelelangan;
 - 4) Menerima, meneliti dan mengevaluasi secara administratif proposal permohonan yang diajukan

oleh pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya disaksikan pihak pemohon;

- 5) melakukan penelitian lapangan;
 - 6) membuat Berita Acara hasil penelitian;
 - 7) memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan usulan calon mitra kerjasama pemanfaatan kepada Bupati;
 - 8) menyiapkan surat jawaban Bupati tentang penolakan atau persetujuan pemanfaatan apabila inisiatif kerjasama berasal dari pihak ketiga (calon mitra);
 - 9) menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pemenang lelang (calon mitra) bagi pemanfaatan yang dilakukan melalui prosedur lelang;
 - 10) mengumumkan pemenang lelang; dan
 - 11) menyiapkan Surat Perjanjian pemanfaatan.
- h). Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah ditetapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat antara lain :
- 1) pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 2) obyek kerjasama pemanfaatan;
 - 3) jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
 - 4) pokok- pokok mengenai kerjasama pemanfaatan;
 - 5) data barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - 6) hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 7) besarnya kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan

dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.

- 8) Sanksi;
- 9) Surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati dan mitra kerjasama; dan
- 10) Persyaratan lain yang dianggap perlu.

4. Bangun Guna Serah.

- a. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagukannya selama kurun waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- b. Penetapan mitra kerjasama Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/peminat, apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.
- c. Penetapan mitra kerjasama Bangun Guna Serah dapat dilakukan proses penunjukan langsung untuk kegiatan yang bersifat khusus atau inisiatif kerjasama tersebut berasal dari pihak ketiga.
- d. dalam hal penetapan mitra kerjasama Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang, Bupati membentuk panitia lelang yang terdiri dari unsur terkait yang berjumlah ganjil.

- e. Dasar pertimbangan bangun guna serah atas barang milik daerah yaitu :
 - 1) barang milik daerah belum dimanfaatkan;
 - 2) mengoptimalkan barang milik daerah;
 - 3) dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
 - 4) menambah/meningkatkan Pendapatan Daerah; dan
 - 5) menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah.
- f. Persyaratan pelaksanaan Bangun Guna Serah:
 - 1) gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - 2) Pemerintah Daerah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan.
 - 3) dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak membebani APBD.
 - 4) bangunan hasil bangun guna serah harus dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Pihak Ketiga.
 - 5) Mitra bangun guna serah harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian.
 - 6) obyek Bangun Guna Serah berupa tanah yang bersertipikat hak pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijaminkan, digadaikan dan dipindahtangankan.
 - 7) Pihak Ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Daerah.
 - 8) Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan dimaksud akan hapus dengan habisnya hak guna bangunan.

- 9) izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah.
- 10) obyek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya.
- 11) mitra kerja bangun guna serah membayar kontribusi ke kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- 12) Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan antara lain :
 - a) Nilai aset berupa tanah milik pemerintah daerah sebagai obyek bangun guna serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua, dan apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan harga pasaran umum setempat yang berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada.
 - b) Apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status penggunaan/ pemanfaatan (fungsi), dimana pola bangun guna serah dilakukan pembangunannya dibawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh (50 %) dari nilai sebagaimana dimaksud huruf a).
 - c) Peruntukan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan atau kepentingan perekonomian/ perdagangan.
 - d) Besaran nilai investasi yang diperlukan/disediakan pihak ketiga.
 - e) Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 13) selama masa pengoperasian, tanah dan/atau bangunan tetap milik Pemerintah Daerah.

- 14) penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah /Kota (RUTRWK).
- 15) jangka waktu kerjasama bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulai masa pengoperasian.
- 16) biaya penelitian, pengkajian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 17) pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan SK Bupati dan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- 18) biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.

g. Prosedur/Tatacara Bangun Guna Serah

Permohonan Bangun Guna Serah ditujukan kepada Panitia tender/lelang dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- 1) akte pendirian.
- 2) memiliki SIUP sesuai bidangnya.
- 3) telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
- 4) mengajukan proposal.
- 5) memiliki keahlian dibidangnya
- 6) memiliki modal kerja yang cukup.
- 7) Data teknis :
 - Tanah : Lokasi/alamat, luas, status , penggunaan saat ini.
 - Bangunan : Lokasi/alamat, luas, status kepemilikan.
 - Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:

- KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
- KLB (Koefisien Luas Bangunan).
- Rencana Pembangunan dlsb.

h. Tugas Panitia.

- 1) Membuat Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelelangan;
- 2) Melaksanakan pengumuman lelang;
- 3) Melaksanakan penjelasan (aanwijzing) pelelangan;
- 4) Menerima, meneliti dan mengevaluasi secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- 5) meneliti dan mengevaluasi proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersama-sama dengan pihak pemohon;
- 6) melakukan penelitian lapangan;
- 7) membuat Berita Acara hasil penelitian;
- 8) memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan usulan calon mitra kerjasama Bangun Guna Serah kepada Bupati;
- 9) menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan kerjasama Bangun Guna Serah apabila inisiatif kerjasama berasal dari pihak ketiga (calon mitra);
- 10) menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pemenang lelang (calon mitra) bagi kerjasama Bangun guna Serah yang dilakukan melalui prosedur lelang;
- 11) mengumumkan pemenang lelang;

- 12) menyiapkan Surat Perjanjian kerjasama Bangun Guna serah.
- i. Pelaksanaan bangun guna serah atas barang milik daerah ditetapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat antara lain :
 - 1) pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 2) obyek Bangun Guna Serah;
 - 3) jangka waktu Bangun Guna Serah;
 - 4) pokok- pokok mengenai bangun guna serah;
 - 5) data barang milik daerah yang menjadi objek bangun guna serah;
 - 6) hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 7) jumlah/besarnya kontribusi yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga;
 - 8) sanksi;
 - 9) Surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati dan mitra kerjasama;
 - 10) Persyaratan lain yang dianggap perlu.
 - j. Penyerahan kembali bangunan/gedung beserta fasilitas kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa pengoperasian yang dijanjikan berakhir dan diaudit terlebih dahulu oleh Inspektorat kabupaten bersama dinas terkait dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

5. Bangun Serah Guna

- a. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan setelah

selesai pembangunannya diserahkan kepada Daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain untuk didayagunakan selama kurun waktu tertentu.

- b. Penetapan untuk Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender yang mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/peminat, apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.
- c. Penetapan mitra kerjasama Bangun Serah Guna dapat dilakukan proses penunjukan langsung untuk kegiatan yang bersifat khusus atau inisiatif kerjasama tersebut berasal dari pihak ketiga.
- d. dalam hal penetapan mitra kerjasama Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender/lelang, Bupati membentuk panitia lelang yang terdiri dari unsur terkait yang berjumlah ganjil.
- e. Dasar pertimbangan bangun serah guna atas barang milik daerah yaitu :
 - 1) barang milik daerah belum dimanfaatkan.
 - 2) mengoptimalisasikan barang milik daerah.
 - 3) dalam rangka efisiensi dan efektifitas.
 - 4) menambah/meningkatkan Pendapatan Daerah.
 - 5) menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah
- f. Persyaratan pelaksanaan Bangun Serah Guna:
 - 1) gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - 2) Pemerintah Daerah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan.

- 3) dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak membebani APBD.
- 4) bangunan hasil bangun serah guna harus dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai bidang tugas baik dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahan kembali.
- 5) Mitra bangun serah guna harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian.
- 6) obyek Bangun Serah Guna berupa tanah yang bersertifikat hak pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dijaminkan, digadaikan dan dipindahtangankan.
- 7) Pihak Ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Daerah.
- 8) Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan dimaksud akan hapus dengan habisnya hak guna bangunan.
- 9) izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah.
- 10) obyek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya.
- 11) mitra kerja bangun serah guna membayar kontribusi ke kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- 12) Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan antara lain :
 - a) Nilai tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerjasama ditetapkan sesuai NJOP dan/atau harga pasaran umum, apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum

yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada.

- b) Kegiatan bangun serah guna untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangan.
 - c) Besaran nilai investasi dari mitra kerja.
 - d) Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.
- 13) selama masa pengoperasian, tanah dan/atau bangunan tetap milik Pemerintah Daerah.
 - 14) penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah /Kota (RUTRWK).
 - 15) jangka waktu kerjasama bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulai masa pengoperasian.
 - 16) biaya penelitian, pengkajian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 17) pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan SK Bupati dan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - 18) biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.

g. Prosedur/Tatacara Bangun Serah Guna.

Permohonan bangun serah guna ditujukan kepada Panitia lelang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- 1) akte pendirian.
- 2) memiliki SIUP sesuai bidangnya.
- 3) telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
- 4) mengajukan proposal.

- 5) memiliki keahlian dibidangnya
- 6) memiliki modal kerja yang cukup.
- 7) Data teknis :
 - Tanah : Lokasi/alamat, luas, status , penggunaan saat ini.
 - Bangunan : Lokasi/alamat, luas,status/IMB, kondisi.
 - Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:
 - KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
 - KLB (Koefisien Luas Bangunan).
 - Rencana Pembangunan.

h. Tugas Panitia.

- 1) Membuat Rencana kerja dan Syarat (RKS) pelelangan;
- 2) Melaksanakan pengumuman lelang;
- 3) Melaksanakan penjelasan (aanwijzing) pelelangan;
- 4) Menerima,meneliti dan mengevaluasi secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- 5) meneliti dan mengevaluasi proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi atau uang sewa setoran dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersama-sama dengan pihak pemohon;
- 6) melakukan penelitian lapangan;
- 7) membuat Berita Acara hasil penelitian;

- 8) memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan usulan calon mitra kerjasama bangun serah guna kepada Bupati;
 - 9) menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan kerjasama bangun serah guna dari Bupati apabila inisiatif kerjasama berasal dari pihak ketiga (calon mitra);
 - 10) menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pemenang lelang (calon mitra) bagi kerjasama bangun serah guna yang dilakukan melalui prosedur lelang;
 - 11) mengumumkan pemenang lelang;
 - 12) menyiapkan Surat Perjanjian kerjasama bangun serah guna.
- i. Pelaksanaan bangun serah guna atas barang milik daerah ditetapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat antara lain :
- 1) pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 2) obyek Bangun Serah Guna;
 - 3) jangka waktu Bangun Serah Guna;
 - 4) pokok- pokok mengenai bangun serah guna;
 - 5) data barang milik daerah yang menjadi objek bangun serah guna;
 - 6) hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 7) jumlah/besarnya kontribusi atau uang sewa yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga;
 - 8) sanksi;
 - 9) Surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati dan mitra kerjasama;
 - 10) Persyaratan lain yang dianggap perlu.

- j. Penyerahan kembali bangunan/gedung beserta fasilitas kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa pengoperasian yang dijanjikan berakhir dan diaudit terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten bersama dinas terkait dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

IX. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

a. Pengamanan

1. Umum

Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

2. Pelaksanaan pengamanan

Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

a) Pengamanan fisik

1) Barang inventaris.

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara:

- pemanfaatan sesuai tujuan.
- penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
- pemasangan tanda kepemilikan.

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :

- Pemagaran.
- Pemasangan papan tanda kepemilikan.
- Penjagaan.

2) Barang persediaan.

Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik.

b) Pengamanan administratif.

1) barang inventaris.

Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :

- pencatatan/inventarisasi.
- kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dll.
- pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker.

Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :

- pencatatan/inventarisasi.
- penyelesaian bukti kepemilikan seperti : Sertifikat, IMB, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.

2) Barang persediaan.

Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib.

c) Tindakan hukum.

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:

- negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
- Penerapan hukum.

3. Aparat Pelaksana Pengamanan

Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a Pengamanan administratif.

- Pencatatan oleh Pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui Pembantu Pengelola;
- Pemasangan label dilakukan oleh Pengguna dibantu oleh penyimpanan barang/pengurus barang SKPD dengan koordinasi Pembantu Pengelola;
- Pembantu Pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah;
- Barang milik daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama pemerintah daerah;
- Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah;
- Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

b Pengamanan fisik.

- Pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna.
- penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola.

- pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati.
- Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tindakan Hukum.

- musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola.
- Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana dengan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama Pembantu Pengelola dan SKPD Terkait.

4. Pembiayaan

Pembiayaan pengamanan barang milik daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

a. Pemeliharaan

1. Umum

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi

persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa :

- a) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh Unit pemakai / pengurus barang tanpa membebani anggaran;
- b) Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan
- c) Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang milik daerah terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor :

- a) Biologis;
- b) Cuaca, suhu dan sinar;
- c) Air dan kelembaban;
- d) Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekanan; dan
- e) Lain – lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat lainnya yang mengurangi kegunaan barang.

2. Sasaran pemeliharaan

Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris.

3. Rencana pemeliharaan barang

- a) Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.
- b) Setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya;
 - 2) Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang; dan
 - 3) Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan.
- c) Untuk Rencana Tahunan pemeliharaan barang bagi SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan, dengan demikian maka Rencana Tahunan Pemeliharaan barang merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Barang harus dengan sepengetahuan Kepala SKPD yang bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

4. Pelaksanaan pemeliharaan

- a) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD.

- b) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- c) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat:
 - 1) Nama barang inventaris;
 - 2) Spesifikasinya;
 - 3) Tanggal perawatan;
 - 4) Jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - 5) Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;
 - 6) Biaya pemeliharaan/perawatan;
 - 7) Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan;
 - 8) Lain-lain yang dipandang perlu
- d) Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh pengurus barang.
- e) Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan barang:
 - 1) Pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pemeliharaan;
 - 2) Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pemeliharaan dibentuk oleh Pengguna Barang dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang dengan tugas – tugas sebagai berikut :
 - i. Sebelum dilaksanakan pemeliharaan panitia pemeriksa menginventarisir dan memastikan jumlah dan jenis barang yang akan dipelihara dalam keadaan membutuhkan pemeliharaan dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - ii. Melakukan pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan barang;

- iii. Membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan barang.
 - 3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa;
 - 4) Pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola;
 - 5) Pembantu pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Bupati;
- f) Format Kartu Pemeliharaan (lampiran 42).

X. PENILAIAN BARANG DAERAH

1. Umum.

- a. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah;
- b. Penilaian barang milik daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. Kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah;
- d. Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi;
- e. Penilaian dalam rangka Penyusunan Neraca Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan reevaluasi aset (penilaian kembali) bersamaan dengan sensus barang daerah.

2. Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah.
 - a. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat melibatkan dengan lembaga independen berSertipikat dibidang penilaian aset;
 - b. Lembaga independen berSertipikat dibidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Panitia penilai, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diperoleh nilai wajar;
 - d. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut;
 - e. Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang berSertipikat dibidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.
3. Ketentuan Khusus.
 - a. apabila harga barang hasil pembelian, pembuatan dan berasal dari sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya, maka dapat dilakukan penilaian oleh Tim Penaksir atau oleh pengguna barang dibantu oleh pengurus barang;
 - b. dalam menentukan nilai taksiran dilakukan dengan membandingkan barang yang sejenis dan tahun yang sama;
 - c. penilaian terhadap benda-benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli dibidang tersebut;
 - d. terhadap barang milik daerah yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai, tidak perlu

dicantumkan dalam daftar nilai untuk membuat neraca (segera di proses penghapusannya dari buku inventaris);

- e. apabila harga barang pembelian, pembuatan atau harga barang yang diterima berasal dari sumbangan/hibah dan sebagainya tidak diketahui karena tiadanya dokumen yang bersangkutan menunjukkan nilai yang tidak wajar, nilainya supaya ditaksir oleh Tim/pengurus barang;
- f. benda-benda bersejarah dan benda-benda yang bercorak kebudayaan tetap dimasukkan ke dalam Buku Inventaris, sedangkan nilainya dapat ditaksir dengan bantuan tenaga ahli dibidang tersebut.

XI. PENGHAPUSAN

1. Umum

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan penghapusan barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

Penghapusan tersebut di atas, dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

2. Dasar penghapusan barang

Pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskan, yakni :

- a. Penghapusan barang berupa tanah dan atau bangunan berdasarkan pertimbangan/ alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1). rusak berat, terkena bencana alam/force majeure.
 - 2). tidak dapat digunakan secara optimal (idle).
 - 3). terkena planologi kota.
 - 4). kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
 - 5). penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.

- 6). pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
 - 7). Kesalahan pencatatan administrasi atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.
- b. Penghapusan barang bergerak (selain tanah dan atau bangunan) berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :
- 1) pertimbangan Teknis, antara lain :
 - secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 - secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
 - telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa.
 - karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
 - selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
 - Kesalahan pencatatan administrasi atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pertimbangan Ekonomis, antara lain :
 - Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle.
 - Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 - 3) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
 - Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.

- Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atauPengurus Barang.
 - Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
 - Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).
3. Penghapusan barang milik daerah meliputi :
- a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna, diusulkan oleh Pengguna/kuasa pengguna kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain dilaksanakan oleh pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Wewenang penghapusan barang daerah
- a. Penghapusan barang-barang inventaris selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - b. Penghapusan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan Barang Inventaris selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya diatas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
5. Kewajiban pelaporan
- Barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Bupati melalui pengelola.
- Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan.

6. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
 - a. Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi).
 - b. Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah.
 - c. Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dan penetapan oleh Pengelola atas nama Bupati.
 - d. Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :
 - 1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
 - 2) Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Prosedur penghapusan barang milik daerah
 - 1). Kepala (SKPD) mengajukan usul penghapusan barang inventaris kepada Pengelola melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pembantu Pengelola.
 - 2). Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pembantu Pengelola barang menghimpun, merekap dan mengusulkan rencana penghapusan dari masing-masing SKPD kepada Bupati melalui pengelola.
 - 3). Untuk melaksanakan penghapusan dibentuk panitia penghapusan yang ditetapkan oleh Bupati untuk penghapusan dari daftar barang milik daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola untuk penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau kuasa pengguna.
 - 4). Panitia penghapusan melakukan penelitian terhadap barang yang akan dihapus, dan hasil penelitiannya dituangkan dalam Berita Acara.
 - 5). Selanjutnya pengelola mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Bupati disertai dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian dari Panitia Penghapusan.

- 6). Untuk penghapusan tanah yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penghapusan.
 - 7). Untuk penghapusan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, Bupati memberikan persetujuan penghapusan dan menetapkan cara pemindahtanganannya kepada pengelola untuk melaksanakannya.
 - 8). Atas dasar persetujuan DPRD, Bupati menetapkan keputusan penghapusan dan cara pemindahtanganannya kepada pengelola untuk melaksanakannya.
 - 9). Atas dasar surat keputusan Bupati dimaksud pada point 7) dan point 8), pengelola barang melanjutkan dengan proses pemindahtanganan.
 - 10). Barang yang sudah disetujui untuk dihapuskan sejak dikeluarkannya persetujuan dari Bupati maka barang tersebut diserahkan pengguna/kuasa pengguna kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk digudangkan (tidak boleh untuk operasional) digudang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang memuat diantaranya spesifikasi barang yang diserahkan;
 - 11). Setelah proses pemindahtanganan selesai Bupati melaporkan hasil penghapusan kepada Menteri Dalam Negeri.
8. Pelaksanaan penghapusan secara khusus
- a. Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati tanpa persetujuan DPRD. Pembangunan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu keputusan penghapusan ditetapkan.
 - b. Bagi gedung yang dibongkar sebagian akibat dari pemeliharaan rutin (maksimal 50 % dari gedung yang ada) tidak memerlukan proses penghapusan.

Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati.

Pengguna Wajib membuat berita acara pembongkaran dan melaporkan material hasil bongkaran kepada Pengelola.

Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah :

- a. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.
- b. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Material Bekas Bongkaran akan diatur dengan Pedoman tersendiri.

XII. P E M I N D A H T A N G A N A N

1. Umum.

Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Dalam hal Pemindahtanganan sebagai tindak lanjut Penghapusan yang disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan administrasi atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan maka pemindahtanganannya cukup dengan penghapusbuku atau pemindahbuku.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
2. Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi :
- a. Penjualan dan Tukar Menukar;
 - b. Hibah;
 - c. Penyertaan modal

3. Penjualan dan Tukar Menukar

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

Adapun Penjualan Barang Daerah yang bersifat khusus tersebut meliputi :

- a. Penjualan Kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
- b. Penjualan rumah golongan III; dan
- c. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh pengelola.

Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang meliputi Tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya.

Barang Inventaris lainnya seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mikro bus, derek, alat-alat berat, pesawat, kendaraan diatas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum serta barang inventaris lainnya.

- a. Penjualan tanah dan/atau bangunan.

Mengingat prinsip pokok bahwa fungsi tanah yang dalam penguasaan Pemerintah Daerah harus benar-benar dipergunakan secara tertib dan harus diamankan, yaitu jangan sampai menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, maka pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan harus jelas luas tanah, lokasi dan nilainya.

Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah tanah Negara yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan, atau tanah berasal dari tanah rakyat yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti rugi ataupun tanah lain yang dikuasainya berdasarkan transaksi lain (sumbangan, hibah), sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dimaksud, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni instansi Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan Keputusan pemberian Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tersebut, kepada instansi Badan Pertanahan Nasional setempat perlu dimintakan sertifikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah.

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) cara, yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling).

Tujuannya:

- 1) Untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dalam rangka pengamanan barang milik daerah;
- 2) Mencegah terjadinya kerugian daerah; dan
- 3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subyek pelepasan (ganti rugi atau tukar menukar/ruilslag/tukar guling) adalah pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dapat dilakukan antara Pemerintah

dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, pegawai/ perorangan, atau Badan Hukum lainnya.

Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar menukar/ruislag/tukar guling) antara lain:

- 1) Terkena planologi;
- 2) Belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
- 3) Menyatukan barang/aset yang lokasinya terpecah untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
- 4) Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
- 5) Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Pelepasan dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam APBD.

Motivasi/pertimbangan lainnya, yakni :

- 1) Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Wilayah (RUTRK/W);
- 2) Membantu instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya;
- 3) Tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas dapat dilepas kepada Pihak Ketiga dengan Pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling);
- 4) Untuk itu perlu diperhatikan:
 - c) Dalam hal tukar menukar (ruislag/tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah;
 - d) Apapun yang harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tersebut harus seijin Pemerintah Daerah agar sesuai dengan peruntukan tanahnya;

- e) Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, proses pelepasannya dilakukan secara lelang umum dan prosedur pelelangannya diatur dengan peraturan Bupati tersendiri;
- f) Dalam hal pelepasan hak dengan tukar menukar (ruislag/tukar guling), diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang mengatur materi tukar menukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Nilai Tanah dan/atau bangunan.

Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi atau dengan tukar menukar (ruislag/tukar guling) kepada Pihak Ketiga, sebagai berikut:

- a) nilai ganti rugi :
 - (1) Nilai Ganti rugi Tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI dan DPRD.
 - (2) untuk Instansi Pemerintah, Koperasi dan/atau Yayasan milik Pemerintah, dapat ditetapkan dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak dan/atau harga pasaran umum setempat.
 - (3) Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman pada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat.
- b) nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan:
 - (1) 2 % untuk bangunan permanent;
 - (2) 4 % untuk bangunan semi permanent;
 - (3) 10 % untuk bangunan yang darurat.

Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran (tidak dikenakan potongan sebesar 50 % seperti pada penjualan rumah dinas daerah golongan III).

c) Proses pelepasan hak atas tanah dan bangunan.

1). Pembentukan Panitia Penaksir.

Bupati membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan:

- (a) meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (b) menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada huruf e angka 2) di atas;
- (c) meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Bupati; dan
- (d) lain-lain keterangan yang dipandang perlu.

Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

2). Permohonan Persetujuan DPRD.

Pengelola menyiapkan surat permohonan Bupati kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir.

3). Keputusan Bupati.

Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Pada lampiran Keputusan Bupati tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni : Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.

- 4). Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan umum dan diumumkan dimedia massa atau pengumuman resmi dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.
- 5). Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.
- 6). Teknis pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan:
 - a) Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar (ruilslag) dimaksud harus diatur dalam Surat Perjanjian Bersama antara Pemerintah Daerah

Dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut harus dicantumkan secara jelas mengenai data tanah dan/atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan lain yang dipandang perlu.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi harus

dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pihak Ketiga mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Penghapusan tanah dan/atau bangunan dari Buku Inventaris.

b) Setelah selesai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Surat Perjanjian Bersama dan Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima tersebut, maka:

(a) apabila mengenai tanah kapling untuk rumah pegawai, harus ditegaskan dalam Keputusan Bupati tentang pelepasan hak Pemerintah Daerah atas tanah tersebut dan menghapuskan tanah tersebut dari Buku Inventaris.

Selanjutnya Sertipikat hak atas tanah bagi masing-masing pegawai yang bersangkutan baru dapat diproses melalui Kantor Pertanahan setempat.

(b) apabila mengenai tanah dimaksud pada huruf a di atas, maka Sertipikat atas tanah yang dilepaskan kepada Pihak Ketiga dapat diselesaikan melalui Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Keputusan Bupati yang bersangkutan tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Pemerintah Daerah dimaksud dan menghapuskan tanah dan/atau bangunan tersebut dari Buku Inventaris .

b. Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III.

1) Kendaraan Perorangan Dinas

a) kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati; umur kendaraan perorangan

dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun dan/atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

- b) yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun;
- c) Apabila 5 tahun masa jabatan Bupati/Wakil Bupati berakhir (lima tahun) dan yang bersangkutan tidak menjabat lagi sebagai Bupati/Wakil Bupati maka hak pembelian Kendaraan Perorangan Dinas menjadi gugur.

- d) permohonan membeli Kendaraan perorangan dinas.

Penjualan Kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.

- e) pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan.

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

Panitia penjualan kendaraan meneliti dari segi administratif/pemilikan Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

- f) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan Dinas.

- (1) penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yakni:

- keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;

- surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun;
 - hasil penelitian panitia penjualan.
 - harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
 - kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku;
 - kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum /pasaran yang berlaku.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain:
- a) Nama dan jabatan pembeli;
 - b) Data mengenai kendaraan;
 - c) Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d) Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Harga yang ditetapkan;
 - f) Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- (3) Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas
- Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya:
- a) dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;
 - b) apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka

biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;

- c) surat perjanjian sewa beli harus memuat :
- besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
 - selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
- d) dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan.
- e) semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- f) setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
- Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan
 - Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.
- g) Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada angka 6) di atas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat

melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h) Bupati dan Wakil Bupati baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

2) Kendaraan Dinas Operasional.

- a) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dijual melalui pelelangan umum;
- b) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih;
- c) Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya;
- d) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari:
 - Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup;
 - Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor dan scooter);
 - Jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan diatas air.
- e) Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional.

Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Bupati melalui pengelola.

f) Pembentukan Panitia Penghapusan.

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional.

Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional dan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan dinas Operasional.

Adapun tugas Panitia Penjualan antara lain :

- Menarik dan menggudangkan Kendaraan Dinas Operasional yang telah disetujui Bupati untuk dihapus;
- Meneliti dan mengevaluasi data administrasi, spesifikasi dan jumlah barang yang akan diserahkan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima;
- Menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) nilai jual Kendaraan Dinas Operasional;
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjualan.

g) Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan:

- Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dilakukan melalui pelelangan umum;
- Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;

- Peserta lelang adalah masyarakat umum dan/atau PNS.
- Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dlsb), penjualan/ pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum;
- Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah.
- Syarat dan tata cara lelang diatur lebih lanjut.

h) Nilai Jual Kendaraan.

Nilai Jual Kendaraan didasarkan pada nilai lelang tertinggi yang melebihi nilai taksiran yang ditetapkan panitia penaksiran.

- Taksiran nilai jual kendaraan yang ditetapkan panitia didasarkan pada HPS.
- HPS yang dibuat panitia didasarkan pada :
 - a. Harga Pasar
 - b. Kondisi / penyusutan
 - c. Ketentuan yang berlaku
 - d. Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang

3). Rumah Dinas Daerah.

- a) Rumah dinas milik daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yakni :
- Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan);
 - Rumah daerah golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah Instansi);

- Rumah daerah golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan Golongan II tersebut di atas.
- b) Rumah daerah golongan III milik daerah dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai.
- Rumah milik daerah yang dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai, hanya rumah daerah golongan III dan rumah daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III yang permanen, semi permanen dan darurat, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Penentuan rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijual yaitu:
 - (1) Rumah Daerah Golongan I;
 - (2) Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Daerah Golongan III;
 - (3) Rumah Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa;
 - (4) Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.
- Yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III.
 - (1) Pegawai Negeri
 - mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - Surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati;

- belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pensiunan Pegawai Negeri :

- Menerima pensiunan dari Negara / Pemerintah;
- Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
- Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Janda/Duda Pegawai Negeri :

- masih menerima tunjangan pensiun dari Negara / Pemerintah, adalah :
 - almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, atau
 - masa kerja almarhum suaminya/ isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
- almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(4) Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- Masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah.
- Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).

- Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/ Daerah :
- masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
 - memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) apabila penghuni rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d 5) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.
- c) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud angka (1) s/d (6) tersebut di atas dilakukan dengan cara Sewa Beli.

Taksiran harga rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah :

- (1) 2 % setiap tahun untuk permanent;
- (2) 4 % setiap tahun untuk semi permanen; dan
- (3) 10 % setiap tahun untuk darurat;

Dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80 % atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 %.

Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia.

Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni:

- (1) pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani.
- (2) pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

d) Permohonan membeli Rumah Daerah Golongan III.

Penjualan Rumah Daerah Golongan III tidak dapat diproses sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penjualan rumah daerah golongan III atau diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya, dan janda/duda sebagai dimaksud pada huruf c) di atas.

e) Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Bupati.

- (1) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai.
 - Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait.
 - Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.

(2) Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain :

- Pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya;
- Keadaan fisik rumah;
- Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
- Ijin penghunian;
- Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
- Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan.;
- Lain-lain yang dipandang perlu.
Hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran.
- Tugas panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir tersebut di atas.
Hasil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/ memutuskan harga taksiran tersebut adalah pengelola.

f) Keputusan Bupati.

Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan yaitu :

- (1) Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai;

(2) Persyaratan-persyaratan administrasi dan pejabat/pegawai pembeli.

Selanjutnya penjualan rumah Daerah golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam Keputusan penjualan rumah Daerah Golongan III harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya.

Selain itu harus pula ditegaskan Pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli

g) Surat Perjanjian Sewa Beli.

Setelah dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penjualan rumah golongan III, dibuat Surat Perjanjian Sewa – Beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak ke I dan masing-masing pegawai/pembeli sebagai pihak ke II.

Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi.

Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan Pelepasan hak .

Selain itu dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

h) Pelepasan hak dan penghapusan dari Buku Inventaris.

Setelah pegawai yang bersangkutan melunasi harga rumah dan/atau ganti rugi atas tanah maka Bupati menetapkan Keputusan tentang :

- (1) Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli.
- (2) Menetapkan penghapusan rumah dan/atau tanah bangunannya dari Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut di atas, maka atas hak/Sertipikat atas tanah bangunan dapat dimohon oleh pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu hak pada Instansi Pertanahan setempat.

i) Pemindahtanganan Barang Inventaris lainnya.

Barang inventaris lainnya meliputi antara lain Alat-alat kantor, Alat-alat rumah tangga dan lainnya. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara lelang umum, lelang terbatas, tukar menukar, hibah dan pemusnahan.

- 1). Pemindahtanganan dengan cara lelang umum atau lelang terbatas dilakukan untuk barang-barang alat-alat kantor dan alat-alat rumah tangga seperti meja kursi kantor, komputer, filing kabinet, meubelair dan lain-lain.
- 2). Pemindahtanganan dengan cara tukar menukar, hibah dan pemusnahan dilakuka untuk barang-barang inventaris seperti Alat Laboratorium, perpustakaan, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, alat bengkel, alat studio dan komunikasi, alat pertanian/peternakan, alat keamanan, alat-alat ukur dan lain-lain.

- j) Contoh format pemindahtanganan :
- (1) Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan barang-barang inventaris dan barang lainnya, Lampiran 43;
 - (2) Format Berita Acara Panitia Penghapusan Lampiran 44;
 - (3) Daftar dan laporan untuk menguji kendaraan bermotor dinas, Lampiran 45;
 - (4) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris, Lampiran 46
 - (5) Format Keputusan Bupati tentang Panitia Penjualan /PenghapusanKendaraan, Lampiran 47;
 - (6) Format Berita Acara Panitia Penjualan Kendaraan Lampiran 48;
 - (7) Format permohonan membeli rumah daerah golongan III lampiran 49 (A,B, dan C);
 - (8) Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga penjualan rumah golongan III lampiran 50;
 - (9) Format Berita Acara Penaksiran Harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya lampiran 51;
 - (10)Format Berita Acara Penilaian harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya lampiran 52;
 - (11)Format Keputusan Bupati tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugia atas tanahnya Lampiran 53;
 - (12)Format Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah daerah Golongan III lampiran 54.

2. Hibah

a. Umum

- 1) Pertimbangan pelaksanaan hibah barang milik daerah dilaksanakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

- a) Hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya; dan
 - b) Hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yaitu hibah antar tingkat Pemerintahan (Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah) dan hibah antara instansi dilingkungan Pemerintah Daerah atau instansi dibawahnya.
- 2) Barang milik daerah yang dapat dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Hibah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan atau Barang Inventaris Lainnya yang telah diserahkan kepada pengelola yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Tata Cara

- 1) Pengelola barang mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
- 2) Bupati dapat membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (c) Apabila Bupati menyetujui atas usul hibah tersebut, maka Bupati mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan hibah/pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan tersebut;
- (d) Setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah;
- (e) Pengguna mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data.
- (f) Bupati dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana hibah tersebut.
- (g) Setelah mendapat persetujuan Bupati ditindaklanjuti dengan keputusan yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati. Selanjutnya pengguna barang melaksanakan serah terima barang/hibah yang dituangkan dalam berita acara.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

a. Umum

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta;
- 2) Pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas barang milik daerah yang sejak awal pengadaannya

direncanakan untuk penyertaan modal dan barang milik daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal.

- 3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat juga dilakukan terhadap barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- 5) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan untuk penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya.

b. Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas Tanah dan/atau Bangunan:

- 1) Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;
- 2) Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola;
- 3) Apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;
- 4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- 5) Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah;
- 6) Pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Tata Cara Penyertaan selain tanah dan/atau bangunan:
- 1) Pengguna barang mengajukan usul kepada Bupati melalui pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim intern Instansi pengguna.
 - 2) Pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya.
 - 3) Hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelola menyampaikan kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD.
 - 4) Setelah Perda ditetapkan, pengguna melakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
4. Laporan pemindahtanganan

Pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal, Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan.

XIII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Umum

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

3. Pengendalian
Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan
Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

XIV. PEMBIAYAAN

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan pembiayaan untuk kegiatan seperti; penyediaan blanko/buku inventaris, tanda kodifikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi sistim informasi barang daerah (simbada) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif penyimpan dan/atau pengurus barang dan lain sebagainya.

Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XV. TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Umum
Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah.
2. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi, Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan TGR.

Tugas Majelis Pertimbangan TGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan apabila ada permasalahan yang menyangkut kerugian daerah.

Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan, selaku Wakil Ketua Satu merangkap anggota;
- c. Assisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua Dua merangkap Anggota;
- d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Sekretaris merangkap anggota;
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, selaku anggota;
- f. Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selaku Anggota;
- g. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selaku Anggota;
- h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku anggota; dan
- i. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan selaku Anggota;

Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR tersebut di atas tidak boleh diwakilkan, dan jumlah keanggotaan Majelis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah anggota harus ganjil dan maksimum 9 (sembilan) orang.

Tugas Majelis Pertimbangan TGR sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah
- b. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TGR yang diterima;
- c. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR;

- d. Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Bupati atas setiap kasus yang menyangkut TGR; dan
- e. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi keuangan Daerah.

Anggota Majelis Pertimbangan TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti rugi, berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Sekretaris merangkap anggota
- c. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan selaku anggota;
- d. Kepala Seksi Penghapusan dan Pengamanan Aset Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku anggota;
- e. Kepala Bidang Data dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selaku anggota;
- f. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
- g. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten selaku anggota.

Tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut:

- a. Membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah;

- b. Menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

3. Tata cara Tuntutan Ganti Rugi Barang

- a. Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah dan Pegawai Daerah (Pegawai Tidak tetap) yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah.

1) Kerugian karena perbuatan melanggar hukum

Kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PNS, Pegawai Perusda maupun Pegawai Daerah Lainnya penggantian kerugiannya minimal sama dengan kondisi barang tersebut (tidak boleh diganti dengan uang)

Perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian daerah misalnya :

- 1) Dijual tanpa melalui prosedur perundangan.
- 2) Digadaikan baik oleh pemegang barang maupun melalui perantara.
- 3) Sengaja menghilangkan barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung
- 4) Menggunakan atau Meminjamkan kepada orang lain tidak dalam kaitan dinas atau tidak sesuai peruntukannya

2) Kerugian karena kelalaian dalam melaksanakan tugas

Kerugian daerah yang disebabkan oleh kelalaian Pegawai dalam melaksanakan tugasnya penggantian kerugiannya mempertimbangkan tingkat kelalaian/kesalahan dan kemampuan ekonomi. Adapun penggantian kerugiannya dapat berupa uang atau barang

Kelalaian dalam melaksanakan tugas diantaranya :

- a) Tidak melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang daerah
 - b) Tidak melaksanakan pengamanan secara maksimal
 - c) Menggunakan barang tidak dalam jam dinas tanpa ijin
- 3) Untuk barang yang diasuransikan, apabila terjadi kerugian daerah maka penggantian kerugiannya dibebankan sepenuhnya kepada pegawai yang menyebabkan kerugian tersebut, sedangkan klaim asuransi merupakan pendapatan daerah dan bukan merupakan penggantian kerugian dari pegawai tersebut.
- b. Tuntutan ganti rugi barang tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri.
 - c. Bupati harus berusaha memperoleh penggantian atas semua kerugian yang diderita oleh daerah dan sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/upaya damai
 - d. Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi barang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Majelis TGR mengumpulkan bahan-bahan bukti, mengadakan penelitian dan menentukan berapa besar kerugian yang sebenarnya diderita oleh Daerah;
 - 2) Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyampaikan laporan kepada Bupati dan Bupati mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan:
 - a) jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - b) sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan; dan
 - c) tenggang waktu 14 hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri terhitung dari tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.

- 3) Bila dalam tenggang waktu 14 hari tidak diajukan pembelaan diri atau diajukan pembelaan diri akan tetapi Kepala Daerah tetap pada pendiriannya karena tidak dapat membebaskannya dari kesalahan /kekeliruan, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- 4) Atas dasar Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan kepada yang bersangkutan atau dengan cara memotong gaji/penghasilan yang bersangkutan dan apabila dianggap perlu, dapat meminta bantuan yang berwajib supaya dilakukan penagihan dengan paksa.
- 5) Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat keputusan tersebut, mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang.
- 6) Pengajuan surat permohonan naik banding, tidak menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.
- 7) Dalam hal pegawai Negeri, pegawai Perusahaan Daerah atau pegawai daerah tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati untuk mohon pembebasan atas kewajibannya untuk membayar ganti rugi.
- 8) Apabila keputusan tingkat banding menyatakan bahwa seorang pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai daerah ternyata dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian daerah, karena kerugian tersebut disebabkan diluar kemampuannya/bukan kesalahannya/ bukan karena kelalaiannya, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan kekurangan kerugian daerah.
- 9) Apabila biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang akan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, tuntutan ganti rugi barang tersebut dapat ditiadakan.

- 10) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Tuntutan ganti rugi barang kadaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah itu dilakukan, tidak mengurangi tanggung jawab pegawai/pihak yang merugikan daerah atas tuntutan berdasarkan hukum Perdata.
- 12) Keputusan pembebanan ganti rugi barang disampaikan kepada pengelola/pembantu pengelola untuk selanjutnya dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan :

- 1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR setelah mendapat saran dari Majelis Pertimbangan.
- 2) Bagi Pegawai Negeri yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah
- 3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pembebanan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi Pembukuan.

4. Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dan Pemberhentian Sementara dari jabatan.

Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pencurian/ perampokan dikantor.

- b. Terjadinya kerugian kepada pegawai yang masih dalam rangka kedinasan.
- c. Bencana alam / force majeure.
- d. Kebakaran yang terjadi di kantor.

Dalam hal tertentu, ternyata tidak mampu membayar ganti rugi dan telah memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas kewajiban mengganti kerugian Daerah dan setelah diadakan penelitian, maka Bupati menerbitkan keputusan penghentian/ penghapusan tuntutan ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam hal Bupati telah menerima laporan tentang kekurangan/kerugian Daerah dari pada Pejabat/pegawai, maka Bupati dapat melakukan tindakan sementara berupa membebaskan pegawai yang bersangkutan dari jabatannya, setelah terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Jika Pejabat/Pegawai, Penyimpan dan/atau pengurus Barang tidak ditahan oleh yang berwajib karena melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan daerah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Setelah ada keputusan Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka pemberhentian sementara harus dicabut.

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri menyatakan yang bersangkutan bersalah dan dijatuhkan hukuman kurungan, Bupati memberhentikan Pejabat/Pegawai, Penyimpan dan/atau pengurus Barang tersebut. Putusan Pengadilan Negeri untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana/pelanggaran hukum tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan Tuntutan Ganti Rugi.

5. Laporan tentang terjadinya kerugian daerah

Terjadinya kerugian daerah dapat diketahui oleh Bupati melalui laporan, baik yang merupakan laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan maupun laporan Kepala SKPD yang membawahi pejabat/pegawai, penyimpan dan/atau pengurus barang yang bersangkutan.

**BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH**

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 7 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2008

NOMOR 34